

Bongkar *Cessie* BPPN dan Kejar 'Setoran' Ala Kejagung

AKTUAL

Edisi 40 | 15 - 30 September 2015

Jokowi Meroket

Tanpa Arah, Tanpa Kendali, #Rapopo



ISSN 2337-8395



WWW.AKTUAL.COM

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 Dedy **081 20 53 8776**
Ranie **081 38 210 44 69**
Rhiza **081 828 0941 009**

 marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latief
PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony
DIREKTUR MAJALAH Wahyu Romadhony
REDAKTUR Ferro Maulana, Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Tri Harningsih
STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Maulana Khama Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nicha Muslimawati, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

HEAD IT DIVISION: Yudhi Astira
NETWORK: Tri Wahyudi (Hd), Rendra
SMC: Resya Muhammad Irgi (Hd), Imelda, Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Najamuddin Arfah (Makasar), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Joko Pramono (Lumajang Jatim)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P

HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji

MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Adititya, Ranie Anggoro

ALAMAT REDAKSI

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
 Telp. 021 83794508 (Hunting)
 Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
 iklan@aktual.com

aktual.com
 TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
 MEDIA

Diambang Krisis?

Pembaca yang budiman, Edisi kali ini Aktual masih tetap menyajikan beberapa *warning* terhadap kemungkinan terjadinya krisis finansial global terhadap Indonesia.

Ada beberapa catatan yang dihadirkan Aktual kali ini. Nilai Rupiah terhadap Dollar adalah salah satu poin penting untuk terus diperhatikan. Karena implikasi dari anjlognya nilai Rupiah ini sangat destruktif jika tidak diantisipasi lebih jauh.

Hal lain yang harus dicermati adalah persaingan beberapa negara adidaya untuk memanfaatkan momentum krisis ekonomi sebagai momentum penting penguasaan geopolitik kawasan. Terutama ASEAN.

Dalam edisi kali ini, Aktual juga menyajikan fenomena yang terjadi di negara tetangga, Malaysia. Demo besar-besaran di Negeri Jiran tersebut harus dipandang sebagai cermin penting untuk melihat sampai sejauh apa kepentingan geopolitik negara-negara adidaya di ASEAN. Intinya, beberapa kasus besar di negara-negara ASEAN bisa saja terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak melakukan antisipasi.

Tak kalah penting untuk terus dikritisi adalah persoalan politik besar di dalam negeri ini: Pilkada Serentak. Ketika UU beberapa saat lalu memutuskan bahwa Pilkada Serentak harus dilakukan pada bulan penghujung tahun ini, saat itu tidak pernah terbersit bahwa krisis finansial global juga

mungkin terjadi pada bulan-bulan di akhir tahun 2015.

Ada yang menyatakan bahwa krisis tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada Serentak. Namun, negara tidak harus menerima mentah-mentah pendapat itu. Negara harus tetap melakukan langkah antisipasi.

Dalam kolom Kaki Hari, Yudi Latief menekankan bahwa demokrasi lebih dari sekadar ledakan perhimpunan, pesta pemilihan, Pemilu/pilkada atau rebutan kekuasaan, tapi modus kekuasaan yang seharusnya lebih menjunjung tinggi daulat rakyat dengan mewujudkan tujuan negara, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

keterampilan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Pesannya sangat jelas bahwa pesta demokrasi berupa Pilkada Serentak harus menjadi pondasi penting untuk menjadikan peradaban negara bangsa ini jauh lebih mulia dan disegani. Bukan justru menjadi pondasi penting timbulnya konflik-konflik baru yang justru menjadikan negara bangsa ini terperosok jauh lebih dalam.

Beberapa artikel lain yang cukup hangat juga kami sajikan buat Anda nikmati di edisi kali.

Selamat membaca. ◊



Laporan Utama

28 Posisi Rupiah Terpuruk

Rupiah resmi bertengger di atas level 14.000, IHSG turun 19,07 persen YOY atau melemah 20,34 persen YtD dari posisi 5.184,95 pada 25 Agustus 2014 ke 4.165,72 pada 24 Agustus 2015.



32 Badai (tidak) Pasti Berlalu

Terlewatnya ambang batas normal (overshoot) nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berimbas pada roda perekonomian nasional, diyakini Presiden bakal berlalu.



36 Krisis Ekonomi Berpotensi Dimainkan Negara-Negara Adidaya

Punya potensi ekonomi dan demografi yang strategis, Indonesia jadi incaran kepentingan negara-negara adidaya baik dari AS-Uni Eropa, Jepang, maupun Tiongkok.



10 LENSE AKTUAL

Kinez Riza: Bahagia Pamerkan Karya 'Selubung Hening' untuk Hiburan Spritual

Kinez Riza mempersembahkan 20 karya terbaru yang memiliki kekuatan energi melalui kinesiologi dan 'body wisdom'.

12 AKTUAL REVIEW

Sejarah Kelam Para Taipan Mencaplok Rawa Jakarta

Booming real estate sejak era 1980-an terjadi di Jakarta. Bagaimana jurus para konglomerasi mencaplok rawa-rawa di kawasan DKI Jakarta?

16 NASIONAL

Pilkada di Lampung Kuning Krisis

Pilkada yang seharusnya jadi solusi untuk menyejahterakan rakyat justru berbalik arah, justru menyengsarakan rakyat.

20 POLITIK

PAN Masuk Singkirkan PKB dan Nasdem

Melabuhnya PAN ke pemerintah tidak hanya membuat gaduh KMP. Barisan partai pendukung pemerintah yang tergabung KIH juga goyah. Pasalnya masuknya PAN akan membuat jatah kursi di kabinet akan dikocok ulang.

22 POLITIK

Menanti Ujung Seteru Rizal Ramli dan Jusuf Kalla

Perselisihan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali terjadi. Masih tentang program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

40 HUKUM

Bongkar Cessie BPPN dan kejar "Setoran" ala Kejagung

Tindakan Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI) dalam perkara dugaan korupsi hak tagih (cessie) Bank Tabungan Negara (BPN) berbuntut panjang.

44 HUKUM

Saling Bantah di Korps Adhyaksa

Ada tiga orang petinggi Korps Adhyaksa saling bantah di kasus pembelian hak tagih (cessie) Bank BTN pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Atau sering disebut media sebagai Kasus Victoria.

48 EKONOMI

Resep untuk Menggairahkan Lagi Ekonomi

Pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan lagi kehidupan ekonomi. Salah satunya adalah dengan insentif di bidang investasi bisnis, perpajakan, dan deregulasi di sektor-sektor kunci manufaktur.

50 EKONOMI

OJK Permudah WNA Buka Rekening di Dalam Negeri

OJK berencana untuk membuat kebijakan terkait kemudahan bagi warga negara asing yang ingin membuka rekening atau *time deposit* dalam bentuk valuta asing (valas).

54 INTERNASIONAL

Gerakan Reformasi Ingin Menggusur Najib

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang dituduh terlibat skandal korupsi 700 juta dolar AS, harus menghadapi tekanan yang meningkat dari gerakan reformasi. Ini masih ditambah lagi, nilai ringgit yang terpuruk dan melemahnya ekonomi.

58 OLAHRAGA

Menunggu Hasil Gebrakan Kemenpora

Kemenpora menggelar uji kelayakan (fit and proper test) bagi tujuh calon Ketua Satlak Prima yang baru untuk menggantikan Suwarno yang masa jabatannya akan segera habis.

60 LIFE

Satu Vaksin Untuk Banyak Penyakit Flu

Vaksin flu baru ditemukan oleh dua kelompok ilmuwan. Vaksin tersebut berfungsi dan menimbulkan kekebalan terhadap subjek penelitian terhadap kedua jenis flu 'H1N1', yang sering disebut "flu babi", dan jenis 'H5N1' atau "flu burung".

62 RESENSI

Mengisi Kekosongan Sejarah Melalui Novel

Peer Holm Jorgensen lebih memilih menceritakan sebuah kesaksian sejarah tidak dengan buku teks sejarah yang mesti melewati tahapan heuristik, verifikasi, dan interpretasi yang sangat kaku. Penulis lebih memilih menceritakannya melalui sebuah novel.

Menteri Rini Soemarno Disebut Intervensi Kasus Pelindo II



Pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim Polri dinilai bentuk intervensi hukum. Hal itu terungkap dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dan Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP, Junimart Girsang menyebut adanya peran Menteri BUMN Rini Soemarno dalam kasus pencopotan tersebut. “Soal intervensi salah satu menteri yaitu Rini Soemarno, yang sesuai informasi yang kami terima, Rini Soemarno menelpon Kapolri sesaat setelah terjadinya pengeledahan tersebut. Padahal, dimana pengeledahan itu sudah mendapat ijin pengadilan,” tandas, Selasa (8/9).

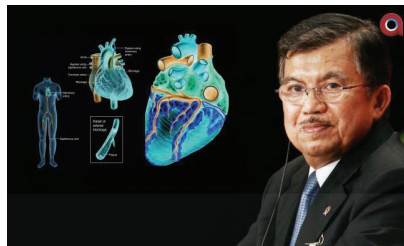
Menjawab pertanyaan tersebut Kapolri Badrodin Haiti membenarkan bahwa pasca pengeledahan yang dilakukan terhadap ruangan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino oleh Bareskrim Mabes Polri, Menteri BUMN Rini Soemarno sempat menghubungi dirinya. “Bu (Menteri BUMN) Rini menelpon saya, yang kebetulan waktu itu saya sedang di jalan habis pulang dari Batam, dan di jalan tol. Beliau menelpon kepada saya, karena saya pernah menjelaskan masalah *dwelling time*, dimana prosesnya sudah kami berikan tentang apa yang harus ditertibkan dan dibenahi,” ucap Badrodin.

Dalam percakapan tersebut Rini menanyakan pengeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Namun Badrodin mengaku saat itu tidak mengetahui pengeledahan

yang dimaksud oleh Rini. “Saya sendiri belum tahu yang mana digeledah. Akhirnya saya telepon dan mendapat penjelasan, bahwa pengeledahan di Pelindo oleh Bareskrim, terkait kasus pengadaan mobil crane yang sepuluh,” beber Jenderal bintang empat itu.

Sesaat kemudian Kapolri kembali menghubungi Rini untuk memberikan penjelasan. “Lalu kemudian saya sampaikan ke bu Rini bahwa tidak ada kaitannya dengan *dwelling time*, itu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Itu jawaban saya,” tandas dia.

Seperti diketahui saat terjadi pengeledahan Lino sempat marah terhadap tindakan petugas Bareskrim Polri. Di depan awak media Lino sempat menghubungi Menteri Badan Pembangunan Nasional (Bapenas) Sofyan Djalil lewat sambungan telepon. Lino mengancam akan mundur dari Pelindo II jika kasus dugaan korupsi tetap diusut oleh Polri. /Wahyu Romadhoni



Masuk RSCM, JK Dioperasi pada Bagian Jantung

Wakil Presiden Jusuf Kalla dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, untuk dipasang ring pada bagian jantungnya.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki membenarkan kabar tersebut dan tak mengetahui pasti penyakit yang diderita JK.

“Iya dipasang ring di jantung,” kata Teten, Rabu (9/9).

Hingga sekitar pukul 20.30 wib, JK masih berada di RSCM untuk mendapatkan perawatan operasi pada bagian jantungnya. /Karel Stefanus

Kapolri Komisi III Sepakat Bentuk Pansus Pelindo II

Kapolri Badrodin Haiti sepakat dengan langkah komisi III DPR RI untuk membentuk panitia khusus (Pansus) terhadap penuntasan kasus yang terjadi di lingkungan PT Pelindo II.

Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan rapat Komisi III DPR RI Trimedy Panjaitan dalam hasil kesimpulan rapat dengar pendapat umum, di Gedung DPR RI, Selasa (8/9).

“Dalam rangka untuk mendorong penuntasan kasus Pelindo II. Komisi III DPR RI akan membentuk Pansus Pelindo II,” kata Trimedy.

Sementara itu, terkait dengan pencopotan yang terjadi kepada Komjen pol Budi Waseso (Buwas) dari Kepala Bareskrim Mabes Polri menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN), komisi bidang hukum hanya mengingatkan agar setiap mutasi dilakukan secara objektif.

“Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar dalam proses dan prosedur mutasi di lingkungan Polri dilakukan secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, transparan dan bebas KKN dengan mengedepankan penempatan pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat sehingga terwujud personel Polri yang profesional, bermoral dan modern,” papar dia.

/Wahyu Romadhoni



Indonesia EBTKE CONEX 2015

Ajang Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sebagaimana amanat Nawa Cita, membangun kedaulatan energi memerlukan sinergi dalam kerangka kelembagaan, antara Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, kalangan usahawan/bisnis, akademisi dan komunitas/masyarakat selaku penerima manfaat.

Berbagai kebijakan Pemerintah yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target kemandirian energi akan didiskusikan bersama-sama antara pemerintah, tenaga ahli, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu caranya adalah melalui penyelenggaraan *The 4th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indonesia EBTKE CONEX) 2015* dan *Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2015*.

Tujuan dari terselenggaranya acara ini ialah untuk mendorong pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang lebih besar. Maka dari itu, acara ini akan fokus pada langkah nyata untuk percepatan pencapaian target pengembangan dan pemanfaatan EBTKE yang tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Sinergi antar lembaga dapat terwujud melalui inisiatif dan terobosan di bidang EBTKE, termasuk diantaranya pemberian insentif melalui kebijakan *feed-in tariff*, dengan memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (panas bumi, air, biomassa, *biofuel*, biogas, surya, angin, samudera) sebagai jaminan energi untuk membangun Indonesia demi kemandirian bangsa," ujar presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (19/8).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menaruh perhatian khusus kepada sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) agar ke



Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka acara The 4th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indonesia EBTKE CONEX) 2015 dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2015 di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu, 19 Agustus 2015.

depan Indonesia tidak lagi bergantung pada energi fosil. Pasalnya, saat ini penggunaan energi fosil masih sangat besar mencapai 94 persen dari bauran energi nasional atau hanya menyisakan 6% untuk energi baru terbarukan. Presiden berharap, ke depan, bauran energi baru terbarukan lebih tinggi dari yang ada saat ini. Untuk itu, dirinya meminta agar masalah yang berkaitan dengan insentif, tarif, dan perizinan di sektor ini diberi perhatian khusus. Berdasarkan info yang diterima Jokowi, Indonesia memiliki potensi panas bumi sampai dengan 29 ribu MW.

"Ini kekuatan yang besar. Kalau diperlukan, dibuat BUMN khusus untuk Geothermal. Karena kita dari Sumatera, Jawa, ke timur, punya potensi yang besar. Perhatian khusus ke bidang ini harus betul-betul diberikan. Meskipun kita tahu harga minyak dunia baru turun," terang dia.

Presiden menekankan bahwa ke depan Indonesia harus bisa masuk ke

era EBTKE, sehingga investasi di energi baru terbarukan dapat terus didorong.

"Kita punya potensi yang besar, yang berlimpah," jelasnya.

Sesuai amanah Presiden, Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan pengembangan energi baru, terbarukan, dan penerapan konservasi energi di Indonesia bukanlah suatu pilihan melainkan telah menjadi suatu keharusan.

"Indonesia EBTKE CONEX 2015 dan IIGCE 2015, diselenggarakan secara *back-to-back* untuk menyinergikan pemikiran dan tindakan seluruh pemangku kepentingan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi dalam membangun kedaulatan energi nasional," jelasnya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, peran/kontribusi energi baru dan terbarukan ditingkatkan dari target sebelumnya sebesar 17 persen menjadi 23 persen pada tahun 2025. Porsi energi terbarukan dari

total kapasitas program tersebut ditingkatkan menjadi 25 persen. Butir-butir penting terkait pengembangan dan pemanfaatan EBTKE yang telah dilakukan Pemerintah, antara lain Perbaikan Tata Kelola (Panas Bumi), Penyediaan Insentif (Bebas Bea Masuk untuk Peralatan dan Teknologi EBT dan Konservasi Energi), Penciptaan Pasar (*Feed-In Tariff*) untuk pembangkit listrik berbasis EBT, Penyederhanaan Perizinan, Pelibatan *stakeholder* dalam penyusunan kebijakan, Mendorong pemanfaatan teknologi yang menggunakan energi secara efisien, Meningkatkan jumlah manajer energi dan auditor energi yang bersertifikat dan membentuk brigade energi untuk mendorong penerapan konservasi dan efisiensi energi.

Dibandingkan dengan jenis energi terbarukan yang lain, Bioenergi mempunyai kekhasan tersendiri karena bentuknya yang dapat berupa padat, gas dan cair serta kemampuannya untuk melengkapi dan menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil selain konversi menjadi tenaga listrik. Sebagai tenaga listrik, saat ini telah diterbitkan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), diharapkan mampu mendorong minat investasi dalam pengembangan Pembangkit Listrik bersumberkan bioenergi.

Sedangkan terkait perubahan skema keekonomian untuk menutup selisih harga pasar antara BBM dengan BBN melalui insentif dana dari

Perkebunan Kelapa Sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Sawit mengungkapkan bahwa bulan-bulan ini adalah masa yang sangat sulit dan masih mungkin lebih sulit kedepan. Namun petani dan industri sawit masih cukup optimis. Paling tidak pohon sawitnya masih ada dan berbuah, pabriknya sudah berdiri dan memproduksi. Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Dr. Dadan Kusdiana, MSc. mengungkapkan bahwa sampai dengan 31 Agustus kemarin, hanya dalam 5 hari kerja telah

biodiesel dalam negeri dan *replanting*. Kedua hal itu meningkatkan permintaan dan mengurangi supply *'in a productive way'*," jelasnya.

Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir. Tisnaldi mengungkapkan bahwa untuk pembayaran dana oleh BPDPKS terhadap selisih kurang HIP Jenis BBM tertentu dengan HIP Biodiesel, KESDM siap melakukan verifikasi volume BBN Biodiesel yang disalurkan ke BU BBM untuk dicampur dengan BBM tertentu jenis minyak solar. Hal ini dimaksudkan agar implementasi pencampuran ke dalam BBM sebesar 15% BBN (B15) dapat terealisasi dengan baik sebelum pelaksanaan mandatori B20 mulai tahun 2016.

"Tahun 2016, kontrak kebutuhan Pertamina diperkirakan mencapai sekitar 2,5 juta KL biodiesel untuk program PSO dan sekitar 2,6 juta untuk non PSO dari total kebutuhan BBN jenis Biodiesel di tahun 2016 yang diperkirakan sebesar 6,48 juta KL," ujar Trisnaldi.

Dengan mandatori penggunaan biodiesel sebesar 20% (B20 tahun 2016, penghematan devisa dan pengurangan ketergantungan terhadap BBM dapat mencapai Rp36,65 triliun. Selain itu, dengan berkembangnya industri bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri akan menyerap tenaga kerja lebih dari 5 ribu orang yang diiringi juga dengan peningkatan pajak penghasilan badan.

"Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit sebesar 61%, pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar sekitar 9,7 juta ton CO₂e yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan serta kedaulatan energi nasional," pungkasnya.



tersalurkan 9,7 juta liter biodiesel dari produsen biodiesel sawit ke Pertamina, atau hampir 10 ribu KiloLiter (KL). Itupun baru yang dikirim lewat truk tangki (jalan darat). Sedangkan pengiriman besar menggunakan kapal akan tiba 1-2 hari lagi. Jumlah itu merupakan bagian kontrak lebih dari 300 ribu KL untuk *delivery* sampai Oktober 2015. 400 ribu KL lagi sedang dalam proses kontrak untuk *delivery* sampai Desember.

"Kami memiliki langkah strategis yang akan diteruskan dalam situasi yang sulit ini: meningkatkan konsumsi



Demokrasi dan Nomokrasi

Di tengah kegaduhan demokrasi, banyak orang dan aktor politik lupa pada pokok persoalan. Bahwa demokrasi lebih dari sekadar ledakan perhimpunan, pesta pemilihan, atau rebutan kekuasaan, tapi modus kekuasaan yang seharusnya lebih menjunjung tinggi daulat rakyat dengan mewujudkan tujuan negara, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dalam kaitan ini, reformasi tata kelola negara menjadi kata kunci dalam perwujudan aspirasi demokrasi dan tujuan bernegara. Ledakan partisipasi massa dalam fase transisi menuju demokrasi sering berujung dengan kekecewaan, ketika hiruk-pikuk perdebatan politik tidak punya persambungan dengan output pemerintahan. Oleh karena itu, ujung prosesi demokrasi harus bermuara pada perbaikan tata kelola kenegaraan yang sepadan dengan tuntutan demokratis.

Lebih dari itu, persoalan tata kelola negara memiliki konsekuensi yang lebih serius bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara-bangsa, yang memiliki kekhasan tersendiri di banding formasi negara-bangsa di Eropa. Dalam sejarah formasi kebanyakan negara-bangsa di Eropa Barat, perkembangan kesadaran kebangsaannya berjalan paralel dengan pembentukan negara. Sedangkan dalam banyak kasus di Eropa Timur, pembentukan negara-bangsa itu merupakan perpanjangan dari kesadaran etno-kultural.

Adapun di Indonesia, kehadiran

negara kolonial mendorong kemunculan kesadaran nasional dan eksistensi negara nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, kebangsaan Indonesia juga tidak dipersatukan oleh kesamaan etnis, agama dan bahkan bahasa, melainkan oleh kehadiran dan pengakuan atas eksistensi negara persatuan berlandaskan prinsip-prinsip nomokrasi dan demokrasi yang disepakati bersama. Dengan demikian, negara merupakan pangkal pengada dari kebangsaan Indonesia. Tetapi dengan alasan yang sama, jika administrasi negara gagal mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan negara, maka negara pun akan menjadi dasar penghancur dari kebangsaan Indonesia.

Peran penting dari administrasi negara itu kini mendapatkan tantangan yang serius dari arus globalisasi dan demokratisasi, yang mempengaruhi secara mendalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kita harus memperhatikan secara seksama implikasi dari penetrasi kedua arus tersebut terhadap administrasi negara, agar bisa memberikan respon yang tepat dan akurat, demi kemaslahatan negara-bangsa Indonesia di masa depan.

Negara Lemah

Arus globalisasi dan demokratisasi di Indonesia mengandung potensi-potensi destrukatif bagi perkembangan negara-bangsa ke depan yang ditimbulkan oleh lemahnya kapasitas dan otoritas negara.

Di masa Orde Baru, luasnya cakupan kendali negara (state scope) masih bisa diimbangi oleh kapasitas negara (state capacity) untuk melakukan enforcement—kendati dalam beberapa segi tidak selalu taat asas dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di era Reformasi, cakupan negara tetap luas—untuk

tidak mengatakan kian meluas karena terjadinya pelipatgandaan institusi negara dan perluasan kewenangan daerah. Namun demikian, terjadi penurunan dalam kapasitas negara untuk melakukan penegakan aturan-aturan tersebut, akibat kekaburan otoritas, persebaran penentu keputusan (veto players), serta kelemahan-kelemahan internal pada aparaturnya negara itu sendiri.

Akibatnya muncul gejala yang dikenal sebagai tanda "negara lemah" (weak state). Pelbagai kelembagaan dan peraturan dibuat dengan fungsi dan penegakkan yang kabur dan lemah, namun telah cukup menimbulkan kekusutan dan ketidakpastian bagi pelaksanaan administrasi negara dan bagi pelaku ekonomi-politik yang terkait. Negara yang lemah tidak akan mampu menegakkan kedaulatan negara ke luar dan ke dalam.

Perlunya Kepemimpinan Kuat

Dengan demikian menjadi jelas bahwa kita tidak cukup berpesta demokrasi. Taruhan kita ada pada kemampuan untuk memperbaiki tata kelola negara.

Demokrasi yang dijalankan tidak bisa bersifat generik yang bisa diambil begitu saja dari pengalaman negara lain, betapa pun majunya negara tersebut. Demokrasi harus disesuaikan dengan falsafah dasar dan amanat konstitusi, yang merupakan abstraksi dari kesadaran dan jati diri bangsa.

Dalam menjalankan demokrasi konstitusional tersebut, tentu saja hal pertama yang harus dibereskan adalah konstitusi itu sendiri. Kelemahan dan kerancuan hasil empat kali amandemen memerlukan pemeriksaan ulang secara seksama. Secara prinsip, walaupun amandemen dilakukan, keseluruhan pasal berikut ayat-ayatnya harus selaras dengan semangat dan prinsip-prinsip negara yang

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kedua, amandemen harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan mempertimbangkan segala implikasi dan konsekuensinya. Ketiga, penyusunannya harus sistematis dan koheren, tidak terkesan tambal sulam dan diorientasikan bagi kepentingan sesaat.

Selanjutnya, dalam usaha melaksanakan konstitusi ini, diperlukan keteladanan kepemimpinan. Dengan kepemimpinan yang committed terhadap konstitusi, ketaatan warga negara pada otoritas bukan sebagai ekspresi dari loyalitas dan ketakutan personal yang bersifat adhoc, melainkan sebagai ekspresi dari kesadaran hukum untuk kemaslahatan bersama yang bersifat permanen.

Komitmen utama konstitusi dan kepemimpinan negara berkhidmat pada upaya untuk mengamankan dan mencari keseimbangan dalam pemenuhan tiga pokok kemaslahatan publik (public goods). Hal ini berkisar pada persoalan legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.

Basis legitimasi dari institusi-institusi demokrasi berangkat dari asumsi bahwa institusi-institusi tersebut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi proses-proses perdebatan publik (public deliberation) secara bebas, setara dan rasional. Hanya dengan penghormatan terhadap prosedur-prosedur public deliberation seperti itulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, dan pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (right) dan tanpa ragu (strong).

Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Presiden/Wakil Presiden acapkali tak sejalan dengan legitimasi demokratis. Adakalanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan proses-proses public deliberation; dan seringkali pula tak menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh hasil public deliberation.

Setelah basis legitimasi diperjuangkan, kemaslahatan publik

selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi. Demokrasi politik tak bisa berjalan baik tanpa demokratisasi di bidang ekonomi. Pancasila sendiri mengisyaratkan, bahwa ujung pencapaian nilai-nilai ideal kebangsaan harus bermuara pada "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Negara kesejahteraan menjadi pertarungan dari kesaktian Pancasila.

Dalam 9 tahun terakhir, praktik demokrasi di Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Namun demikian, capaian-capaian ini seringkali dimentahkan oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi.

Memperkuat Kesadaran Pelayanan Publik

Demokrasi pada akhirnya harus membangkitkan kesadaran pelayanan kepada rakyat sebagai ibu pertiwi. Betapapun indahnya slogan demokrasi, tanpa komitmen pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat, yang dihasilkan adalah tirani.

Tentu kisah masih ingat pada peringatan Soekarno 70 tahun yang lalu, tentang kemungkinan demokrasi tanpa demos (tanpa pemberdayaan rakyat) seperti di Perancis pasca revolusi. "Ya, marilah kita ingat akan pelajaran revolusi Perancis itu. Marilah ingat akan bagaimana kadang-kadang palsuanya semboyan demokrasi, yang tidak menolong rakyat-jelata bahkan sebaliknya mengorbankan rakyat-jelata, membinasakan rakyat-jelata sebagaimana telah terjadi di dalam revolusi Perancis itu. Marilah kita awas, jangan sampai rakyat-jelata Indonesia tertipu oleh semboyan 'demokrasi' sebagai rakyat-jelata Perancis itu, yang akhirnya ternyata hanya diperkuda belaka oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor 'demokrasi'—kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tetapi sebenarnya hanya mencari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan sendiri!"

Maka hal pertama yang harus diingat adalah pandangan Mohammad Hatta, bahwa negara tak lebih dan tak kurang adalah "panitia kesejahteraan rakyat".

Dalam pandangannya, pemenuhan kesejahteraan ini hanya akan terwujud jika semangat kebangsaan dibina di atas landasan "kedaulatan rakyat". Tak ubahnya dengan konsep bangsa, kedaulatan rakyat adalah sebuah program yang bertolak dari sebuah keyakinan, bahwa manusia ini sederajat, karena itu sama-sama mempunyai hak untuk mengatur corak hidup bersama. Meskipun demikian bukan berarti kedaulatan rakyat yang dicita-citakan itu bertolak dari individualisme, yang menjadikan orang seorang sebagai ukuran segala sesuatu, tetapi dari kesadaran kolektivisme."

Bahwa Indonesia adalah cita-cita politik bersama yang untuk mewujudkannya perlu ada pengikatan dan komitmen bersama. Dan dalam hal ini, Bung Hatta menyebutkan pentingnya menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan para pemimpin dan aparatur negara. "Sebab," menurutnya, "kalau rasa tanggung jawab tidak mendalam sedalam-dalamnya, bangsa kita akan sukar mencapai kesanggupan untuk "menentukan nasibnya sendiri di kemudian hari".

Selanjutnya dikatakan, "Indonesia luas tanahnya dan besar daerahnya dan sebagai nusantara tersebar letaknya. Oleh karena itu soal-soal yang mengenai pembangunan negara Indonesia yang merdeka dan kuat tak sedikit jumlahnya dan tidak pula mudah adanya. Pemerintahan negara yang semacam itu hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya, dan mempunyai pandangan yang amat luas. Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada kita, jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa" (Pidato Radio 8 Nopember 1944).

Akhirnya, Bung Hatta kerap kali menyeru kepada kerabat-kerabat sebangsa untuk sama-sama menggemakan bait puisi dari Rene de Clerq, "Hanya ada satu tanah yang bernama tanah airku//Ia makmur karena usaha, dan usaha itu ialah usahaku." ◦



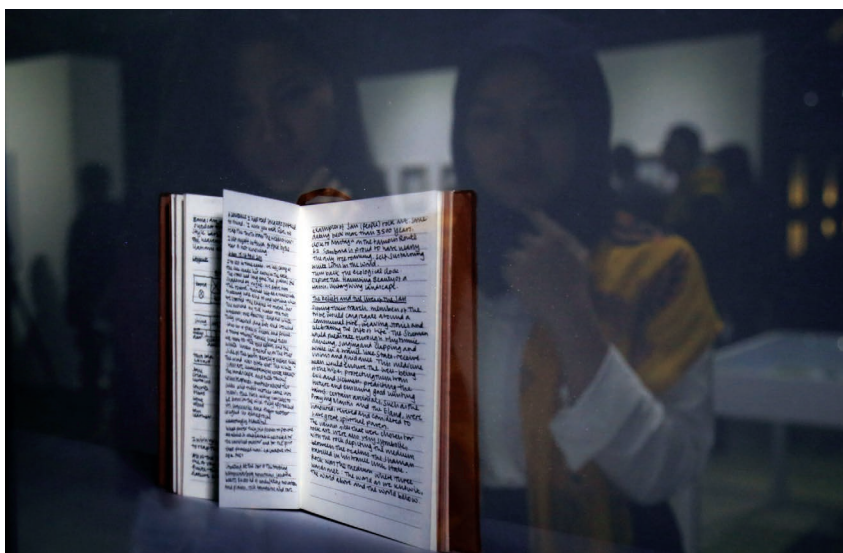
Kinez Riza: Bahagia Pamerkan Karya ‘Selubung Hening’ untuk Hiburan Spritual

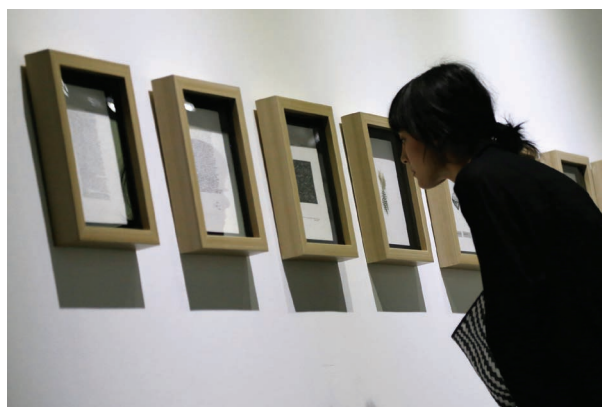
Menghelat pameran tunggal fotografi bertema ‘Selubung Hening’ di Art Salian Space Bandung, Jawa Barat, Seniman fotografi muda, Kinez Riza mempersembahkan 20 karya terbaru yang memiliki kekuatan energi yang menimbulkan rasa nyaman bagi yang melihatnya melalui kinesiologi dan ‘body wisdom’.

Pada pameran kali ini, dara cantik berusia 26 tahun tersebut, mengangkat berbagai karya dengan mengedepankan unsur keindahan alam. Hasil bidikan kameranya itu akan turut mengajak pengunjung untuk meresapi serta memandang fakta realita dunia yang kita huni saat ini sangat berbeda bila kita dengan cermat membaca setiap pertanda

yang ada di alam semesta.

“Di setiap batu, pohon yang menjulang tinggi, sungai dan tanah yang dipijak terekam berbagai keriuhan dari setiap peradaban. Semuanya saya tampilkan dengan kerendahan hati, tenang dan hening tanpa keterpaksaan dan keinginan untuk ditemukan,” terang Kinez Riza,





kepada *Aktual*, Jumat (4/9) malam.

Keheningan yang dimaksud, lanjut Kinez, jika dibaca serta diresapi akan memberikan sedikit petunjuk akan esensi dasar keberadaan manusia karena keagungan alam yang selalu memberikan penjelasan, bahwa perjalanan manusia itu akan beriringan dengan makhluk hidup lainnya dalam keheheningan.

“Dengan fotografi sebagai media utama dan favorit, saya menangkap keheheningan tersebut dengan sangat seksama melalui berbagai objek yang ditemukan ketika melakukan perjalanan atau ketika mengasingkan diri dari keseharian kepada alam. Hening dalam karya-karya yang

dipamerkan disini menawarkan kesempatan untuk sejenak keluar dari keriuhan yang ada,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Kinez mengakui, bahwa dirinya merasa senang dapat menghadirkan hasil karya yang bisa dinikmati oleh para pecinta fotografi Indonesia.

“Saya sangat bahagia mendapat kesempatan untuk memamerkan karya bertema ‘Selubung Hening’ ini. Saya berharap karya saya ini dapat menjadi hiburan spiritual yang dapat menyejukan hati masyarakat Indonesia,” katanya lagi.

Masih di tempat yang sama, Dokter Hanson Barki yang berprofesi sebagai Spesialis Akupunktur Terapan

menimpali secara gamblang fenomena energi yang ada dalam foto-foto karya Kinez jika dilihat dari unsur kesehatan.

“Ada banyak seniman yang bisa melahirkan karya yang indah, tapi hanya beberapa hasil karya seni yang lahir dengan kekuatan energi positif yang terpancar dalam karyanya dan bermanfaat bagi tubuh manusia,” bebernya sambil tersenyum.

“Setiap tubuh memang memiliki kekuatan tersendiri. Tubuh memiliki cara yang unik untuk berkomunikasi, caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, bukan keinginan yang tidak baik untuk masuk ke dalam tubuh,” pungkashansong panggilan akrab dr Hanson Barki.◦

Ribut soal ulah Pemerintah DKI membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang ditengarai tidak sesuai prosedur hukum dan beraroma korupsi, sontak teringat betapa strategisnya lahan-lahan tanah di berbagai wilayah kawasan DKI Jakarta yang jadi incaran para konglomerat, khususnya para taipan sejak dulu sampai sekarang.

Melalui serangkaian kasus yang mencuat selalu berujung pada satu tema: Menggasak rawa-rawa, untuk dijadikan pemukiman.

Sekitar satu abad lalu, rawa di Jakarta membentang tak kurang seluas 20.000 hektar, dengan luas kota Jakarta kala itu tak lebih dari 150 km². Sekarang, dengan luas 700 km², rawa di Jakarta ternyata hanya kurang lebih 2000 hektar.

Kenapa bisa berkurang secara drastis seperti itu? Ya itu tadi, rawa-rawa itu telah dicaplok untuk jadi daerah pemukiman.

Booming real estate sejak era 1980-an terjadi di Jakarta, barang tentu mengandung cerita bagaimana jurus para konglomerat mencaplok rawa-rawa di kawasan DKI Jakarta. Misalnya saja ketika para konglomerat mulai mencaplok rawa di sekitar Sunda Kelapa untuk kompleks wisata yang kini dikenal sebagai Taman Impian Jaya Ancol. Setelah itu, mulailah setapak demi setapak rawa di Jakarta dipreteli satu persatu.

Salah satu aktor penting dari kalangan konglomerat dalam skema pencaplokan rawa-rawa di Jakarta adalah Ir Ciputra, bos Jaya Group. Sasaran utama Pak Ci adalah Rawa di Muara Angke dan Muara Kapuk. Lahan seluas 4000 hektar itu, kemudian ditimbuni 10 juta meter kubik tanah, demi untuk mewujudkan sebuah impian. Membangun sebuah kota di tepian pantai. Mirip seperti kota di ceruk pantai Venesia, Italia.

Langkah Ciputra tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian dia membangun kompleks perumahan mewah di atas lahan seluas 1.200 hektar. Inilah yang kelak dikenal dengan Pantai Indah Kapuk (PIK).



Sejarah Kelam Para Taipán **Mencaplok Rawa Jakarta**

Sebagai bakal calon kota di tepian air, di sekeliling PIK, Marina ditekankan. Lapangan golf seluas 85 hektar dibangun tak jauh dari kawasan pemukiman itu. PIK juga dilengkapi dengan apartemen, pusat bisnis, mega department store, kompleks perkantoran, kawasan rekreasi, pusat seni dan perhotelan.

Namun sisi menarik dari kisah ini, Ciputra ternyata tidak sendirian dalam

menangani mega proyek ini. Sejumlah konglomerat Indonesia ternyata ikut andil dalam proyek impian Ciputra ini. Seperti Sudwikatmono, Ibrahim Risyad, Henry Pribadi, Mochtar Riadi, Budiarsa Sastrawinata, Andre Halim, Teddy Djohar, dan Djony Djohar, serta Ismail Sofyan.

Melalui penggalangan dukungan dari para konglomerat ini, Ciputra berhasil menggalang dana Rp 3 triliun



saat itu.

Tragisnya, warga Jakarta Utara harus menerima akibatnya sebagai korban. Punahnya rawa di Muara Angke misalnya, membuat warga Kelurahan Koja, Tanjungpriok, selalu banjir setiap air laut pasang. Padahal sebelum rawa-rawa itu dicaplok para konglomerat sebagai daerah pemukiman, warga setempat tak pernah mengalami banjir.

Kedua serupa juga dialami oleh warga Kelurahan Kebon Bawang. Hujan sedikit saja, daerah ini pasti banjir. Tak heran jika kemudian PIK jadi sasaran kemarahan banyak orang. Sehingga tak kurang dari Profesor Ishemat Surianegara, pakar ekologi dan sumberdaya Institut

Pertanian Bogor (IPB), pada 1993 menuding PIK sebagai proyek mewah yang menyengsarakan rakyat. Punahnya rawa bukan saja menimbulkan banjir, tetapi juga mempermudah pengikisan tepian pantai oleh gempuran ombak.

Masuk akal jika perembesan air laut ke daratan Jakarta juga semakin meluas dan tak terkendali. Rawa Muara Angke sejatinya merupakan kawasan hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut dan hutan bakau di rawa Teluk Naga hancur akibat jadi lahan perumahan.

Menurut catatan *Aktual* pada Mei 1993, PIK pula yang kemudian mencaplok kawasan hutan lindung di Muara Angke. sekitar 851 hektar

dari 1.100 hektar hutan di Muara Angke habis ditelan untuk dijadikan perumahan mewah.

Dalam Tabloid Detik terbitan Mei 1993, Ciputra membantah jika dirinya bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek yang dibangunnya di atas rawa-rawa. Menurut Ciputra, PIK didukung oleh konsultan lingkungan dari Belanda, sehingga dampak lingkungan sudah dianalisis dan diperhitungkan secara matang.

Yang mungkin Ciputra lupa, masalah krusial dari proyek ini adalah dampak dari beralihnya rawa-rawa menjadi kawasan pemukiman, bukan pada pasca pembangunan pemukiman tersebut.

Tapi Ciputra bukanlah aktor satu-satunya dalam urusan mencaplok rawa-rawa di Jakarta. Konglomerasi Dharmala Group pun memainkan jurus serupa. Lewat anak perusahaannya, PT Taman Harapan Indah (THI), konglomerasi milik Hendro Gondokusumo itu menimbun rawa di Muara Karang, seluas 40 hektar, sehingga mirip seperti pulau kecil.

Di atas timbunan rawa ini, dibangun 450 unit rumah, 45 di antaranya dijual seharga Rp 1 miliar. Sisanya, rata-rata dijual Rp 300 juta. Dipicu oleh prospek untung besar, THI kemudian mulai menyasar rawa di Muara Karang, untuk lahan 250 unit rumah seharga 700 hingga Rp 1 miliar. Bahkan dalam rencananya, THI akan membangun *kondominium* dan *town house* di atas rawa seluas 100 hektar.

Untunglah, dalam jajaran pemerintahan Presiden Suharto kala itu, masih ada menteri yang punya nurani dan akal sehat. IB Sudjana, Menteri Pertambangan dan Energi ketika itu, kemudian membatalkannya, dengan alasan pengurangan rawa di Muara Karang itu akan mempersempit celah pantai, sehingga proses pendinginan air laut yang akan mengalir ke dalam turbin PLTU Muara Karang, terhambat. Dan jika ini dibiarkan terus, mesin turbin akan rusak. Padahal, PLTU Muara Karang merupakan bagian dari interkoneksi aliran listrik Jawa-Bali. ●Hendrajit



Sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada saat pelaksanaan kegiatan nonton bersama Layar Tancap film "Garuda di Dadaku" di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung (16/8). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Negara BUMN RI Rini M. Soemarno.

"BUMN HADIR UNTUK NEGERI" PERSEMBAHAN BUMN UNTUK INDONESIA PADA PERINGATAN HUT KE-70 KEMERDEKAAN RI DI JAWA BARAT

PT Telkom Indonesia, Tbk (Telkom) bersama dengan BUMN di Jawa Barat mengadakan kegiatan Jalan Sehat 8 Km yang dimulai dari kantor Telkom, Gedung Graha Merah Putih, Bandung. Acara ini diikuti oleh lebih dari 5000 orang yang terdiri dari karyawan BUMN dan masyarakat kota Bandung. Jalan Sehat 8 Km merupakan bagian dari kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri yang merupakan tema besar dari Kementerian BUMN dalam rangka memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan RI. Telkom, dipercaya Kementerian BUMN untuk menjadi Ketua kegiatan BUMN untuk wilayah provinsi Jawa Barat dengan PT Bhanda Ghara Reksha dan Perum Jasa Tirta II sebagai Wakil Ketua.

Bersama dengan Dirgantara Indonesia, Dahana,



Kegiatan Dalang (daur ulang) Bersih di kawasan Bandung Techno Park, Kampus Telkom University, yang dihadiri oleh Menteri Negara BUMN RI Rini M. Soemarno (16/8).



Pelaksanaan Jalan Sehat "BUMN Hadir untuk Negeri" yang melibatkan 5000 masyarakat Jawa Barat.



Penyerahan Bantuan Pasar Murah dan Renovasi Tempat Ibadah untuk Kecamatan Ciwidey Jawa Barat oleh Menteri Negara BUMN Rini M. Soemarno disaksikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung (16/8).



Penyerahan bantuan bedah 45 rumah veteran kepada perwakilan veteran sesaat setelah pelaksanaan Upacara Peringatan Kemerdekaan RI yang ke-70 di lingkungan Telkom Corporate University, Bandung (17/8).

Pindad, LEN Industri, PT INTI, Perum Peruri, Askrindo dan BUMN lainnya, Telkom melaksanakan berbagai kegiatan untuk masyarakat yang berada di Jawa Barat khususnya kota Bandung yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di wilayah Jawa Barat.

"Telkom bersama-sama dengan BUMN lain mendapat mandat dari Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan acara khusus BUMN Hadir untuk Negeri di provinsi Jawa Barat. Ini merupakan bentuk pengabdian dan persembahkan BUMN bagi bangsa Indonesia untuk menyemarakkan HUT RI yang telah memasuki usia ke- 70 tahun," ujar Direktur

Utama Telkom Alex J. Sinaga selaku Ketua Wilayah Jawa Barat Peringatan 70 Tahun Indonesia Merdeka "BUMN Hadir untuk Negeri", saat mengikuti acara Jalan Sehat di kantor Graha Merah Putih Telkom, Bandung (16/8).

Pada tanggal 16 Agustus 2015, kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri diawali dengan Jalan Sehat 8 Km. Selain Jalan Sehat, acara ini juga disemarakkan dengan hiburan, kuliner gratis jajanan kaki lima dan pengundian doorprize dengan puluhan hadiah yang menarik. Hadiah ini disediakan oleh BUMN yang turut meramaikan kegiatan Jalan Sehat, seperti Bank Rakyat Indonesia, Pindad, Bank Mandiri, PT INTI, Dahana, Pegadaian

dan BUMN lainnya.

Kemudian, rangkaian acara dilanjutkan dengan kegiatan Dalang (daur ulang) Bersih di kawasan Bandung Techno Park, pemutaran film layar tancap di Monumen Perjuangan Bandung dan Kegiatan Sosial Pengobatan Gratis yang dilakukan di setiap acara Peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka di Jawa Barat.

Pada tanggal 17 Agustus 2015, dilaksanakan Upacara Peringatan HUT RI di kawasan Telkom Corporate University yang diikuti oleh seluruh BUMN yang ada di Jawa Barat. Dalam kegiatan upacara akan dilakukan seremonial penyerahan bantuan 17 laboratorium SMK dan bantuan bedah 45 rumah veteran. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan kemerdekaan. Dalam rangkaian peringatan HUT RI, BUMN diantaranya Telkom, BGR, Dahana, Perum Peruri, Pindad dan LEN Industri melakukan kegiatan sosial berupa penjualan sembako murah di lokasi Bandung, Subang dan Tasikmalaya sebanyak lebih dari 5000 paket.

"HUT Kemerdekaan RI merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Diharapkan dengan adanya program BUMN Hadir untuk Negeri ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyemarakkan semangat kemerdekaan," tutup Alex.

Sedangkan Rini Soemarno mengatakan, BUMN Hadir untuk Negeri digelar agar BUMN di Indonesia dapat memberikan sumbangan terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan perannya sebagai regulator, Kementerian BUMN akan terus berupaya mengembangkan BUMN sehingga BUMN benar-benar menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kita berharap bahwa BUMN hadir untuk negeri ini memberikan gambaran pada masyarakat bahwa BUMN itu akan selalu berada di tengah masyarakat untuk membantu masyarakat pula," jelas Rini M. Soemarno di tengah-tengah Mahasiswa Telkom University Bandung, Minggu, 16 Agustus 2015 lalu. "Dan pada saat yang sama memang mendekatkan antar BUMN sehingga keluarga besar BUMN saling mendukung di tempat kerjanya dan mendukung masyarakat setempat" imbuhnya.

Pilkada di Lampu Kuning Krisis

Tak mudah memang menerawang apa yang akan terjadi dalam sebuah eksperimen baru di dalam demokrasi kita: Pilkada Serentak.

Bayangkan. Indonesia punya 34 provinsi dan 492 kabupaten/kota. Jika setiap provinsi dan kabupaten kota melakukan pilkada serentak maka ada sekitar 525 pelaksanaan pilkada setiap lima tahun di negara ini. Kalau mau dihitung per hari, maka setiap empat hari pasti ada pilkada.

Soal biaya penyelenggaraan, diperkirakan biaya minimal satu pilkada kabupaten atau kota adalah Rp 25 miliar. Sedangkan, biaya penyelenggaraan pilkada provinsi, bisa mencapai Rp minimal 100 miliar. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memperkirakan total biaya pilkada yang dikeluarkan negara ini akan mencapai angka Rp17 triliun.

Uang sebesar itu yang akan dikeluarkan negara. Itu belum terhitung dana pribadi yang akan dikeluarkan setiap pasangan kontestan untuk memenangi pilkada. Untuk kelas pilkada Jatim saja, pernah salah seorang kontestan mengaku butuh modal Rp1 triliun. Apa lah artinya dana sekitar Rp100 miliar yang dikeluarkan negara.

Itu belum soal potensi konflik di sekitar pilkada yang mungkin terjadi. Mendagri Tjahjo Kumolo sempat khawatir soal tingginya potensi konflik yang akan terjadi bulan Desember esok. "Potensi konflik jauh lebih tinggi dari pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2014 lalu," katanya beberapa waktu lalu.



Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kiri) bersama Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) memimpin rapat koordinasi di Kemendagri, Jakarta, Kamis (3/9).

Menteri Tjahjo mencatat sedikitnya ada lima faktor penyebab pilkada menjadi sumber konflik baru yakni profesionalitas dan independensi penyelenggara pilkada; sistem peradilan sengketa pilkada yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri setempat; fungsi Panwaslu yang belum maksimal; moralitas aparat penegak hukum terutama soal suap; dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih di bawah rata-rata tentu membuat mereka mudah dimanfaatkan para politisi yang ikut pilkada hanya untuk merebut kekuasaan dan sekadar memiliki kepentingan ekonomi, bukan untuk menjadi pemimpin yang peduli terhadap kondisi rakyat di daerah.

Menteri Tjahjo paham, jika sebagian besar pilkada serentak terjebak dalam konflik maka harganya akan sangat mahal. Pilkada yang seharusnya jadi solusi untuk menyejahterakan rakyat justru berbalik arah, justru menyengsarakan rakyat. "Energi bangsa habis hanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan pilkada," tambah Tjahjo.

Kekhawatiran Tjahjo memang sangat beralasan. Kalau melihat praktik penyelenggaraan Pemilu di banyak negara, biasanya persiapannya dua tahun. Baru kali ini, di Indonesia, persiapan pilkada (serentak lagi) persiapannya kurang

dari 1 tahun.

Di sisi lain, ada catatan masalah hukum di balik penyelenggaraan pilkada serentak yang masih sangat rawan jika diimplementasikan. Ambil contoh salah satunya, soal calon tunggal misalnya. Itu belum beberapa pertanyaan besar dari sebagian anggota DPR soal apakah negara mampu? "Ya, pertanyaannya kan banyak sekali, terutama KPU, Bawaslu dan Kepolisian tidak siap," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beberapa saat lalu.

Keraguan Fahri Hamzah bisa jadi benar ketika negara saat ini sedang masuk lampu kuning krisis ekonomi akibat gempuran ombak krisis ekonomi global. Bukan KPU, Bawaslu dan Kepolisian saya yang belum siap. Tapi sebagian rakyat-pun belum "siap".

The show must go on. Ya begitulah. Karena amanat UU, negara harus tetap memastikan pemilu serentak harus tetap berjalan apapun risikonya meski pemerintah tidak pernah menjamin bahwa pilkada serentak itu berhasil 100%. Yah... Namanya eksperimen. Uji coba. Pasti ada yang gagal dan tidak.

Sebuah eksperimen yang sangat mahal harganya ketika negara berada di lampu kuning krisis. Apakah ini masuk juga masuk dalam catatan Menteri Tjahjo sebagai faktor yang menyebabkan pilkada justru sebagai sumber konflik baru? o Sukardjito



Eka Sastra saat berbicara dalam diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema 'Revisi UU No. 5 Tahun 2009 tentang Larangan Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat', di Gedung DPR RI, Selasa (1/9).

Revisi UU Persaingan Usaha

Membereskan Kartel, Melindungi Rakyat

Penegakan hukum terhadap praktik kartel harus diperkuat. Para pelaku sudah selayaknya dihukum berat. Selama ini, penegakan hukum terhadap pelaku kartel dirasa kurang tegas. Mereka hanya dijatuhi sanksi denda yang nilainya miliaran rupiah.

Padahal, kartel ini dalam aksinya meraup keuntungan besar hingga triliunan rupiah. Sanksi denda tidak membuat kartel jera. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memperkuat keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Fokus kami adalah mengamandemen Undang-Undang Persaingan Usaha. Kita akan mengawal agenda ini untuk memecah kartel, menguatkan KPPU, selain itu perbaiki kebijakan," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra, di Gedung DPR RI, Selasa (1/9) pekan lalu.

Diskusi Forum Legislasi 'Revisi UU No.5 tahun 2009 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat' diikuti juga Ketua KPPU

Muhammad Syarkawi Rauf.

Menurutnya, kartel dalam dunia usaha sejak lama tidak pernah tuntas penanganannya. Kartel terus-terusan menyengsarakan rakyat dengan memaksanya membeli berbagai barang yang melambung tinggi. Harga daging sapi yang belakangan melambung tinggi contohnya.

"KPK saja diperkuat. Masak KPPU yang bisa menurunkan harga operator seluler dan harga pesawat ditelantarkan. Kita butuh perubahan kewenangan KPPU," katanya.

"Ini harus kita kawal, karena jantungnya ada di kartel. Kartel beres, maka ratusan triliun uang negara bisa diselamatkan," tegas Eka.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, sanksi denda kepada kartel selama ini paling tinggi sebesar Rp25 miliar. Ia mengusulkan denda pelaku kartel ditingkatkan menjadi Rp1 triliun sehingga bisa menciptakan efek jera. Bila perlu sanksi pidana penjara bisa juga diterapkan jika Indonesia memang benar-benar ingin membasmi praktik-praktik kartel

perdagangan.

"Kita perlu membawa mereka ke arah pidana, dalam revisi UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Supaya hukumannya makin berat. KPPU terbentuk pada masalah kewenangan. Kewenangan KPPU saat ini tidak bisa membawa pulang dokumen yang disita, paling-paling kita hanya dapat foto copy-an, itupun kalau ada orangnya," ucap Syarkawi.

Disinggung pula tantangan ke depan sejalan diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015. Dengan kata lain, secara langsung dihadapkan dengan kartel-kartel internasional.

"UU Persaingan Usaha sudah saatnya untuk direvisi, untuk memagari ekonomi kita," papar dia.

Revisi UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu dari 159 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. RUU inisiatif DPR ini juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015 bersama 36 RUU lainnya. *Adv*

IMF Tawarkan Indonesia Pinjaman Infrastruktur

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menilai pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi masa depan Asia yang lebih baik.

“Bagi ekonomi perbatasan, perbaikan jalan, kereta api, dan pelabuhan, serta pasokan baru air dan listrik, akan menjadi semacam tonggak pembangunan. Bagi negara berkembang, kota layak huni dengan transportasi umum yang baik dan jaringan IT yang canggih, dapat membantu menghindari dari “jebakan kelas menengah”,” ujar Lagarde di Jakarta, Rabu.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan bahwa kebutuhan infrastruktur Asia selama satu dasawarsa ke depan akan mencapai 8,3 triliun dolar AS.

Menurut Lagarde, hal itu berarti memerlukan dana pemerintah yang cukup besar, sehingga langkah pertama



adalah investasi publik yang lebih banyak dan memiliki target yang lebih baik.

“Dengan kata lain, belanja infrastruktur yang efisien, yang menyerukan kebijakan fiskal yang kuat, sesuatu yang dapat IMF bantu,

termasuk perencanaan yang matang, kontrol belanja yang efektif, dan peningkatan mobilisasi penerimaan pajak,” kata Lagarde.

Namun, lanjut Lagarde, uang pemerintah tidaklah cukup. Ia menilai infrastruktur juga memerlukan pasar modal untuk menyediakan sumber-sumber baru pembiayaan swasta, termasuk modal risiko dari dana infrastruktur yang dapat dijual kepada investor jangka panjang. Hal itu juga mensyaratkan adanya asuransi kredit.

Lagarde menambahkan, investasi swasta juga harus dibangun di atas dasar lingkungan bisnis yang menarik. Hal tersebut juga bermakna bahwa pemerintahan juga harus mendukung dengan aturan yang transparan dan dirancang dengan baik serta intoleran terhadap korupsi.

“Hal ini dapat memperkuat ekspektasi bahwa risiko dan hasil yang didapat akan mencapai keseimbangan yang tepat,” ujar Lagarde. / Ismed Eka

Jokowi Tolak Proposal Kereta Cepat Jepang dan Tiongkok

Setelah melalui serangkaian proses *beauty contest* proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung dari persaingan Tiongkok dan Jepang, kabar terbaru yang masih menjadi teka teki adalah siapa pemenang tender tersebut?

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan usai Rakor Deregulasi memberikan sinyal penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap proposal yang telah disodorkan.

Dia mengatakan, pemerintah menyerahkan pembangunan megaprojek tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikategorikan sebagai badan usaha bukan pemerintah.

“Presiden sepakat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena saat ini sudah ada jalur eksisting kereta. Kalau mau bikin kereta dengan jalur berbeda, ya biarkan saja, biar dunia usaha yang bangun,” terang dia di kantor Kemenko

Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Kata Jonan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya sebagai regulator yang menyerahkan proyek kereta cepat dengan skema *business to business* (B to B).

“Iya intinya B to B. Mau BUMN yang bangun, atau BUMN patungan dengan siapa juga boleh. Terserah saja selama tidak pakai APBN langsung maupun tidak langsung. APBN kan terbatas lebih baik bangun kereta api di luar Jawa, seperti kereta Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua,” papar dia.

Meski tidak secara frontal mengatakan penolakan terhadap proposal tersebut, namun Jonan menegaskan, pengerjaan konstruksi kereta cepat melalui jalan B to B, maka diserahkan kepada BUMN dan perusahaan pelat merah itu bisa menggandeng Tiongkok maupun Jepang.



“Putusannya harus B to B. Proposal ditawarkan ke pemerintah, sekarang pemerintah tidak ikut-ikutan. Kami cuma jadi regulator, mau dibikin kereta cepat, setengah cepat, seperempat cepat atau tidak cepat, terserah asal B to B saja. BUMN diklasifikasikan sebagai badan usaha bukan pemerintah,” tegas Mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) itu.

Saat ditanyakan apakah KAI yang ditunjuk untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, Jonan bungkam. “Tidak tahu saya, tanyakan ke Bu Rini Soemarno (Menteri BUMN). Kemenhub sebagai regulator akan mengeluarkan izin trasenya ke mana, pembangunannya bagaimana,” pungkas Jonan. / Ismed Eka



Kasus Abraham Samad Siap Disidangkan

Berkas perkara dugaan kasus pemalsuan dokumen yang menyeret Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

"Ternyata P21-nya sejak 31 Agustus," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Spontana, Rabu (2/8).

Tony mengatakan, saat ini jaksa penuntut sedang menunggu pelimpahan tahap dua, yakni

tersangka dan barang bukti dari Polda ke Kejaksaan. Ia menjelaskan, kewenangan jaksa penuntut hanya sebatas mempertanyakan tahap dua karena karena kasus tersebut masih menjadi tanggung jawab Polda Sulselbar.

"Tentu kita punya mekanisme untuk menanyakan tindak lanjut itu. Kita menanyakan itu, jika P21 tidak direspon, maka kita kirim P21A, jika tersangka dan barang bukti belum

diserahkan," jelasnya.

"Kita batasi diri jangan sampai masuk kewenangan penyidik terlalu dalam," ujar Tony.

Polda Sulselbar pada 9 Februari 2015 menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana Administrasi Kependudukan.

Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat yang juga menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor. Saat mengajukan permohonan pembuatan paspor pada 2007, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Sangkaan yang ditujukan kepada Abraham adalah masalah kecil yang hanya terkait pemalsuan surat tindak pidana administrasi kependudukan berdasarkan pasal 264 ayat (1) subs pasal 266 ayat (1) KUHPidana atau pasal 93 Undang-undang RI No 23 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan UU No 24 tahun 2013 tentang kependudukan. /Nebby

Mangkir Praperadilan, Jaksa Agung Pilih Beberkan Materi Diluar Persidangan

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku belum mengetahui bahwa pihaknya mangkir dalam sidang gugatan praperadilan yang dilayangkan PT Victoria Securities Indonesia (VSI) terkait pengeledahan dan penyitaan.

"Saya belum terima laporan (tidak hadir). Mereka (Jaksa) sudah bisa mempertimbangkan itulah" kata Prasetyo di Kejaksaan Agung usai Shalat Jumat, (11/9).

Kendati pihak Kejaksaan tak hadir dalam persidangan, Prasetyo justru membeberkan materi gugatan praperadilan. Ia mengatakan bahwa VSI menuntut ganti rugi sebesar Rp1 triliun kepada Kejaksaan.

"Biar aja mengajukan praperadilan, kita mau dituntut Rp 1 triliun, Rp 2

triliun silakan saja. Kita gak masalah," ujar Jaksa Agung asal Partai NasDem besutan Surya Paloh itu.

Meski demikian, Prasetyo 'kekeuh' bahwa pihaknya tak menyalahi prosedur pada saat melakukan pengeledahan pada 12-13 Agustus 2015 lalu.

"Saya ingin sampaikan justru dalam gugatan biar terbuka nanti di situ dikatakan bahwa kejaksaan tidak ada izin. Izin kita lengkap!," tandasnya.

Seharusnya, hari ini PN Jaksel menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan PT VSI melawan Kejaksaan. Namun, kejaksaan selaku tergugat tak hadir sehingga persidangan di tunda hingga, Jumat (18/9) pekan depan. /Nebby





PAN Masuk Singkirkan PKB dan Nasdem

Rumah di Jalan Widya Chandra IV Jakarta, Senin (1/9) lebih ramai dari biasanya. Malam itu si empunya rumah yaitu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengundang sesepuh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membicarakan permasalahan yang penting. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Soetrisno Bachir.

Zulkifli yang menjabat Ketua Umum PAN meminta saran kepada Amien soal rencananya untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara esok harinya. Pertemuan tersebut telah dijadwalkan untuk mendeklarasikan PAN masuk dalam jajaran partai pendukung pemerintah. “Pada Selasa (1/9)

malam, Pak Zul ada acara ulang tahun di Widya Chandra. Ada teman-teman berkumpul, lalu saya diajak ke dalam. Dia bilang akan bertemu Pak Jokowi,” tutur Amien di kediamannya di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, Kamis (3/8).

Amien merestui langkah Zulkifli dengan syarat. Ia meminta Zulhas panggilan Zulkifli untuk menyampaikan pada Presiden agar melakukan pendekatan politik kepada partai lain yang belum bergabung dengan pemerintah. Menurutnya dalam menghadapi krisis politik pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh partai, tidak hanya PAN. “Kalau ini tidak sampai koalisi yang lebih besar tidak perlu malu PAN untuk menarik diri lagi, karena ini langkah awal untuk jangka panjang,”



Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais memberikan pernyataan sikap kepada wartawan di kediamannya, Sleman, Kamis (3/9).

tandas Amien Rais.

Esok harinya Zulhas mendatangi Istana Negara. Ia datang bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir. Usai menggelar pertemuan tertutup Presiden Joko Widodo mengumumkan bergabungnya PAN dalam partai pendukung pemerintah. “Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah) disaksikan Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir (kedua kiri), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri) serta Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kanan) usai memaparkan bergabungnya PAN dengan koalisi partai pendukung pemerintah, Jakarta, Rabu (2/9).

yang lebih besar, kepentingan negara dan rakyat, inilah politik kebangsaan,” kata Presiden Jokowi usai menerima Ketum PAN Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (2/9).

Zulhas beralasan langkah PAN bergabung untuk membantu pemerintah lepas dari keterpurukan perekonomian nasional. “Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung, kalau sebelumnya mendukung, dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah,” kata besan mantan Ketum PAN Amien Rais itu.

Bergabungnya PAN mengejutkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi penyeimbang pemerintah. Sejak Presiden mengumumkan bergabungnya PAN petinggi KMP langsung sejumlah pertemuan. Bahkan Sekretaris Harian KMP Fahri Hamzah mengaku tidak percaya PAN bergaung dengan pemerintah. “Saya tidak percaya,” tegasnya.

Akhirnya pimpinan KMP sepakat mendengarkan penjelasan Zulhas di Bakrie Tower, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hadir dalam pertemuan itu petinggi KMP, Prabowo Subianto Ketum Gerindra, Aburizal Bakrie Ketum Golkar dan sejumlah Sekjen partai yang bergabung dengan KMP. “Saya tidak menyatakan keluar atau masuk KMP maupun KIH. Kita bergabung dengan pemerintah untuk fokus membantu pemerintah menghadapi kesulitan bangsa ini. Itu inti PAN gabung ke pemerintah,” usai pertemuan.

Usai pertemuan pimpinan KMP akhirnya mengerti alasan PAN. “Kita tegaskan sikap sahabat-sahabat di KMP untuk menjalankan demokrasi yang baik dan kuat kita butuh keseimbangan untuk kebaikan bangsa dan rakyat,” tegasnya usai pertemuan.

Melabuhnya PAN ke pemerintah tidak hanya membuat gaduh KMP. Barisan partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga goyah. Pasalnya masuknya PAN akan membuat jatah kursi di kabinet akan dikocok ulang. Amien Rais tidak menampik kemungkinan adanya kader PAN dalam kabinet jika *reshuffle* jilid II Kabinet Kerja yang diyakini tidak akan lama lagi terjadi. “Rasa-rasanya akan ada *reshuffle* tambahan, PAN akan dapat kursi, rasanya akan ke sana. Kalau nggak ke sana kok aneh,” ujar Amien.

Informasi yang dihimpun *Aktual* menyebutkan akan ada dua partai yang kehilangan jatah menteri. Yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). PKB yang mendapatkan jatah 3 kursi akan berkurang satu begitu juga dengan Nasdem. Hal ini diakui oleh Ketua DPP PKB, Lukman Edy. “Saya mendengar kabar itu, namun belum dapat konfirmasinya. Yakni bila PAN masuk maka ditawarkan satu atau dua jabatan kementerian sebagai tanda dia bagian dari pemerintah,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9).

PKB mengaku tidak rela jika kadernya yang berada di Kabinet Kerja dicopot akibat masuknya PAN. “Kalau tanya ke saya, saya bilang tidak ikhlas. Kalau mau geser, geser yang lainlah. Kenapa mesti PKB? Kalau sikap Ketua Umum (Muhaimin Iskandar) tentu pikirannya lebih luas,” kata Lukman.

Kemungkinan besar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar kali ini yang masuk dalam radar perombakan kabinet. “PKB dinilai kurang loyal,” ujar sumber *Aktual* dilingkaran istana.

Sementara itu kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo juga menjadi sorotan, khususnya terkait dengan perintah Menkopolkum agar penegakan hukum tidak dibuat gaduh. Seperti diketahui Kejaksaan Agung disorot oleh media saat melakukan penggeledahan kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI).

Penggeledahan ini dinilai tidak tepat karena kondisi investasi di Indonesia yang sedang lesu. Nama lain yang juga masuk dalam daftar pemantauan adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menteri yang dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini bermasalah dengan kesehatan.

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden. “Kalau dipandang perlu dan presiden merasa suatu kebutuhan, agar kabinet yang dipimpinnya segera *running* menjalankan tugas-tugasnya, itu hak presiden, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden. Termasuk jika ingin mempertimbangkan PAN masuk dalam kabinet, itu hak prerogatif presiden,” ucap dia.

PAN sendiri mengaku telah menyiapkan kader terbaik untuk masuk dalam Kabinet Kerja. “Kalau PAN kan selalu ada kader terbaiknya dari pemerintahan Gusdur, Megawati, SBY, jadi kalau dari kebutuhan stok kader tidak ada masalah,” ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (2/9).

PAN juga disebut akan mendapatkan jatah di lembaga non pemerintah yakni Komite Ekonomi Nasional (KEN). PAN mengajukan nama Soetrisno Bachir sebagai Ketua KEN menggantikan mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang ditunjuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Mas Tris sudah siap, pada waktunya akan mundur dari Ketua MPP, karena tidak mau rangkap jabatan,” ujar sumber *Aktual*, Jumat (4/9).

KEN merupakan lembaga non pemerintah yang bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait dengan permasalahan perekonomian. Pada Era Presiden SBY KEN dipimpin Chairul Tanjung dengan wakil Raden Pardede dan Sekretaris Aviliani. Pada tanggal 17 Oktober 2014 KEN dibubarkan oleh SBY seiring habisnya masa tugas Presiden. Wahyu Romadhoni

Perselisihan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali terjadi. Kali ini masih tentang program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Usai rapat koordinasi kelistrikan di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (7/9) Rizal mengatakan jika proyek tersebut dapat membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero gulung tikar.

Alasannya berdasarkan hasil kajiannya saat ini Indonesia dalam 5 tahun ke depan hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW. Artinya bila dilanjutkan ada sekitar 21.000 MW yang menganggur. Rizal mengatakan, dengan kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), maka PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP. Artinya pakai tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta. "Maka PLN harus bayar 72% listrik dari listrik yang tidak terpakai," tuturnya.

Rizal menambahkan, PLN telah menghitung perkiraan listrik yang akan dibayarkan dari 72% atau 21.000 MW yang tidak terpakai nantinya bila proyek 35.000 MW ini selesai dalam 5 tahun ke depan. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai USD 10,763 miliar per tahun atau sekitar Rp 150,6 triliun. "Mau dipakai apa tidak PLN wajib bayar listrik yang tidak terpakai, 72% yang tidak terpakai dari proyek 35.000 MW itu nilainya tidak kurang

Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (tengah) berbicara didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan (kanan) dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir (kiri) dalam rapat koordinasi sektor energi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (7/9).



Menanti Ujung Seteru Rizal Ramli dan Jusuf Kalla

dari USD 10,763 miliar," ungkap Rizal.

Beban inilah yang menurut mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini dapat membuat PLN bangkrut. "Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutup Rizal.

Pernyataan Rizal membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla berang. Ia menyebut jika Rizal tidak memiliki kewenangan dalam menghentikan proyek tersebut. "Tidak usah ngomong lagi deh. Kalau sudah

ditetapkan, ditetapkan. Yang menetapkan presiden, memangnya Menko bisa ubah Presiden?" kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Selain JK, Rizal juga membuat Staf Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi angkat bicara. Menurutnya pernyataan Rizal telah mengganggu iklim investasi di Indonesia. "Yang paling saya khawatirkan itu investor di luar itu, nanti dinilai apa ini Indonesia kok Presiden bilang begini Menkonya begitu, kan tidak benar namanya,



itu tidak bagus untuk iklim investasi kita. Terlalu lama kita itu bicaranya satu sama lain tidak satu arah, bikin *confused* (bingung) semua,” jelas Sofjan di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Sofyan tindakan Rizal telah menjatuhkan wibawa Presiden. “Sebenarnya tidak perlu panjang berargumentasi berteori-teori, sebagai pembantu presiden harusnya mengikuti apa maunya Presiden saja, ya kan? Dia (Rizal) ini mau beri lihat bahwa dia lebih pintar dari Presiden, saya tidak tahulah,” kata Sofjan.

Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Rizal. “Dia boleh memberikan nasihat tapi intern dengan presiden dalam rapat kabinet untuk mengubah bahwa ini

Wapres Jusuf Kalla saat Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9).

ada persoalan. Bicaranya di dalam, jangan ke luar. Seolah-olah dia lebih pintar dari presiden. Kalau begini celaka kita semua,” tutur Sofjan.

Sebelumnya Rizal juga sempat berseteru dengan JK di hari pertamanya bekerja sebagai Menko. Saat itu Rizal bahkan menantang JK untuk berdebat tentang program 35.000 MW. Saat itu Rizal menilai proyek tersebut tidak realistis. “Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” tegas Rizal sambil berlalu di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/8)

Ungkapan Rizal sempat memanaskan Kabinet Kerja. Bahkan

Presiden Joko Widodo langsung menegur Rizal dalam rapat kabinet. Rizal juga sempat memancing perseteruan kembali saat mengkritik pembelian Airbus A350 XWB oleh Garuda Indonesia. Rizal bilang tidak ingin Garuda kembali bangkrut, akibat harus berutang untuk memesan 30 unit pesawat Airbus besutan baru pabrikan asal Perancis.

Pasalnya maskapai pelat merah itu menurut Rizal ingin menggunakan A350 XWB sebagai armada yang melayani penerbangan rute-rute baru menuju Eropa. “Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus 350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.◦

Wahyu Romadhoni

Presiden Lantik Teten Sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Teten Masduki yang sebelumnya menjabat Tim Komunikasi Presiden dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.

Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Rabu sekitar pukul 09.20 WIB, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Teten dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 91/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Kepres itu memutuskan dan menetapkan untuk memberhentikan Luhut Binsar Panjaitan sebagai KSP disertai ucapan terima kasih dan mengangkat Teten Masduki sebagai KSP dengan hak dan fasilitas yang diberikan setara menteri.



Pada kesempatan itu Presiden Jokowi sebelumnya menanyakan kepada Teten apakah dirinya beragama Islam kemudian dijawab oleh Teten bahwa dirinya beragama Islam.

Kemudian Presiden mengambil sumpah jabatan secara Islam. Setelah itu Teten menandatangani SK pengangkatan tersebut.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat dan menteri

Kabinet Kerja.

Teten lahir di Garut, Jawa Barat, 6 Mei 1963 dari keluarga petani, masa kecil Teten dihabiskan di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Setamat dari SMA, Teten kuliah di IKIP Bandung, mengambil jurusan kimia. Kesadaran terhadap masalah-masalah sosial sudah tumbuh sejak SMA.

Sekitar 1985, Teten ikut aksi demonstrasi membela petani di Garut, yang tanahnya dirampas.

Nama Teten mencuat ketika Indonesia Corruption Watch (ICW), yang dipimpinnya, membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung (saat itu) Andi M. Ghalib pada masa pemerintahan B.J. Habibie.

Pada tahun 2012 Teten memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur mendampingi Rieke Diah Pitaloka dalam Pilgub Jawa Barat 2013 namun gagal mendapatkan kursi tersebut. /Karel

Lima Pesan SBY Untuk Calon Kepala Daerah

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima pesan bagi kader partainya yang akan maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015.

"Lima pesan ini diharapkan menjadi pedoman dan dilaksanakan. Pertama, dalam kampanye, calon kepala daerah harus menjelaskan kepada rakyat bagaimana memajukan daerah," kata SBY di Cipanas, Sabtu (29/8).

Hal tersebut dikatakan SBY dalam pembekalan pendidikan kader menghadapi Pilkada 2015 di Cipanas, Jawa Barat. SBY



mengatakan kader Demokrat yang menjadi calon kepala daerah harus menjelaskan bagaimana dirinya memajukan daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pesan kedua, kata SBY, kader Demokrat jangan mengobral janji terutama yang nyata-nyata tidak bisa ditepati, misalnya menjanjikan pertumbuhan ekonomi delapan persen.

SBY mengatakan, semakin janji diumbar, semakin tidak ditepati, dan rakyat sudah cerdas dalam menilai setiap ungkapan yang dikatakan calon

pemimpin. "Sampaikan yang bisa dicapai dengan realistis dan bisa dicapai," katanya.

Dia menjelaskan pesan ketiga, yaitu di saat kondisi ekonomi susah maka kepala daerah harus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjadi di daerah. SBY meminta kepala daerah harus melakukan stabilisasi harga dan memastikan pencegahan pemutusan hubungan kerja.

Keempat, SBY meminta kadernya yang nanti menjadi kepala daerah untuk kembali menghidupkan program-program prorakyat. Menurut dia, kader Demokrat diwajibkan menjalankan program prorakyat tersebut seperti yang pernah dijalankan di era pemerintahannya.

Pesan kelima, SBY mengatakan keamanan daerah harus dijaga dengan menjaga kerukunan sosial maupun kemajemukan yang ada. "Tidak boleh ada pertikaian di daerah yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antargolongan," jelas SBY. /Wahyu

JK: Kita Akan Pertimbangkan PAN Masuk Kabinet

Partai Amanat Nasional (PAN) mendeklarasikan diri mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terkait gabungannya PAN, Jusuf Kalla menyampaikan pemerintah belum membahas terkait kursi yang akan disediakan untuk PAN.

"Belum sampai ke tahap itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/9). Namun, kata JK, pemerintah akan melihat perkembangan kondisi ke depannya terkait jatah kursi yang akan disediakan untuk PAN. "Nanti kita lihat pertimbangannya, eh perkembangan kemudian. Belum dibicarakan sampai sana," tambah dia.

Sebelumnya, PAN beralasan bergabung dalam partai politik pendukung pemerintahan karena ingin mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan itu keluar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno bertemu Jokowi dengan difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

"Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. /Karel



Effendi Minta Jokowi Lengser

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), Effendi Simbolon mengatakan sebaiknya Presiden Joko Widodo mengakui jika tak mampu memimpin Indonesia. Hal itu disampaikan karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini melemah dan hampir krisis.

"Sebaiknya Pak Presiden sportif mengakui tidak mampu memimpin bangsa dan negara, selanjutnya turun tahta atau meletakkan jabatan presiden," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/9).

Ia menyerukan, sebaiknya hal itu dilakukan Jokowi agar kondisi Indonesia dalam segala bidang tidak semakin memburuk. Turun tahta juga perlu dibudayakan ketika seorang pemimpin tidak mampu menjalankan amanah, demi menghindarkan

negara terperosok dalam keadaan yang semakin parah.

"Itu (turun tahta) sah, halal demi bangsa. Tiru Soeharto secara kesatria mengundurkan diri mengakui tidak mampu," ucapnya.

Menurutnya, melambatnya perekonomian dalam negeri, disertai terjun bebasnya nilai tukar rupiah saat ini tidak dapat disebut sebagai kelemahan dari para menteri, melainkan tanggung jawab penuh Jokowi sebagai presiden.

Ia mencontohkan, dalam hubungan pembantu rumah tangga dan majikan, pasti sebagai seorang majikan harus lebih mampu mengarahkan anak buahnya, bukan sebaliknya.

"Presidennya yang harus mampu bukan pembantunya yang mampu, masak pembantu rumah gua yang mampu, *gua* majikannya di *bloon-bloonin*. Nggak mau lah," ucap kader pengusung Jokowi -JK saat Pilpres itu. /Wahyu

Didampingi Pengurus DPP Rasiyo-Lucy Resmi Maju Pilwali Surabaya

Pasangan Calon Walikota Surabaya Rasiyo-Lucy Kurniasari resmi mendaftarkan diri di KPUD Surabaya. Pasangan yang diusung oleh koalisi Demokrat-PAN ini datang didampingi oleh Sekjen partai Demokrat Hince Panjaitan, Bendahara Umum Demokrat, Indrawati Sukadis dan pengurus DPP Demokrat Pramono Edhie Wibowo, Selasa (8/9).

Dari hasil pendaftaran, ketua KPU Surabaya, Robbian Arifin, mengatakan untuk berkas-berkas dan persyaratan Rasiyo sudah dinyatakan lengkap.

Namun, untuk persyaratan Lucy masih ada kekurangan, diantaranya lampiran tes kesehatan dan surat kepaillitan dari pengadilan.

"Untuk pak Rasiyo memang sudah lengkap. Tetapi untuk Lucy masih ada beberapa yang harus dilampirkan. Walaupun bukan persyaratan pokok, tetapi harus dilampirkan, dan bisa



menyusul." ujarnya, (8/9).

Sementara, untuk melengkapi berkas tersebut, pasangan calon Rasiyo-lucy sendiri akan secepatnya melengkapinya, termasuk tes kesehatan dalam waktu dekat.

Bagi Rasiyo sendiri, diakuinya bersaing dengan Risma adalah sesuatu yang berat. Tetapi, dirinya optimis bisa bersaing ketat, bahkan mengalahkan Risma.

"Menghadapi bu Risma itu berat. Jadi butuh perjuangan. Tetapi kami optimis dengan strategi kita. Yang jelas, belum saatnya kita tunjukkan strateginya bagaimana." ujar Rasiyo. /Wahyu



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, JAWAB TANTANGAN EKONOMI INDONESIA

Tantangan terbesar perekonomian Indonesia, dari sisi domestik, adalah masalah infrastruktur.

Terbatasnya infrastruktur tersebut menyebabkan tingginya biaya logistik, yang pada gilirannya meningkatkan ongkos ekonomi. Menjawab hal tersebut, penguatan infrastruktur perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam diskusi bertajuk “Memperkuat Modal Dasar Konektivitas”, yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Palembang,

Sumatera Selatan.

Saat ini Indonesia membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan berkualitas. Konektivitas fisik tersebut meliputi jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara serta jaringan konektivitas digital yang andal dan efisien. Tersedianya infrastruktur yang memadai secara merata di Nusantara, yang berbiaya terjangkau, dapat dengan segera menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan kemudahan usaha dan daya saing perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah telah berupaya melakukan penguatan konektivitas fisik, antara lain melalui pengembangan jalan nasional, penambahan jalan tol, jalur kereta api,

pengembangan dan pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga merencanakan untuk meningkatkan konektivitas digital melalui pengembangan jaringan pita lebar (bandwidth) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun telah terdapat kesadaran akan adanya kebutuhan penguatan konektivitas di seluruh Indonesia, serta usaha mencapainya, disadari bahwa tantangan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas masih menghadang. Untuk itulah diperlukan koordinasi yang semakin kuat antara berbagai elemen, termasuk Bank Indonesia dan Pemerintah pusat maupun daerah, untuk menemukan



solusi terbaik untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Diskusi di Palembang dimaksud diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai rangkaian acara diseminasi buku Laporan Perekonomian Indonesia

(LPI 2014). Buku LPI adalah publikasi rutin tahunan BI yang memuat secara komprehensif dinamika perekonomian nasional pada tahun yang bersangkutan. Mengangkat tema "Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat

Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi", buku LPI 2014 sebelumnya telah diluncurkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2015. Sesuai dengan semangat untuk memetik pembelajaran dari perjalanan ekonomi di tahun sebelumnya, diseminasi LPI menyertakan diskusi mengenai topik ekonomi yang menyertakan berbagai elemen terkait, seperti Pemerintah pusat maupun daerah.

Diskusi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo. Sementara itu pembicara yang hadir dalam diskusi adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Deputy Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Direktur Utama PT Jasa Marga, Adityawarman, dengan moderator Lana Soelistianingsih. Acara turut dihadiri oleh Gubernur Bangka Belitung, H. Rustam Efendi, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, serta pimpinan daerah serta perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera.



Posisi Rupiah Terpuruk

Badai sempurna melanda pasar keuangan Indonesia. Dalam beberapa waktu belakangan ini, Rupiah resmi bertengger di atas level 14.000, IHSG turun 19,07 persen YOY atau melemah 20,34 persen Ytd dari posisi 5.184,95 pada 25 Agustus 2014 ke 4.165,72 pada 24 Agustus 2015.

Melihat sejarah panjang kurs rupiah, setelah Joko Widodo terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2014 berada di level Rp11.714. Kala itu, pasar begitu yakin ketika Jokowi menjadi presiden maka rupiah akan berada di bawah level Rp10.000.

Namun, menjelang akhir tahun 2014, pergerakan kurs rupiah pada pasar spot tidak menunjukkan perbaikan, bahkan semakin merosot ke level Rp12.388 pada 31 Desember

2014. Kurs tengah BI pun ikut terpukul ke level Rp12.440.

Semakin lama Jokowi menjabat, gempuran perekonomian global seperti gagal utang Yunani, devaluasi Yuan, hingga sentimen naiknya suku bunga bank sentral Amerika Serikat memaksa kurs rupiah semakin terpuruk ke level Rp14.160 (Kurs tengah BI pada 3 September 2015).

Sontak melemahnya kurs rupiah membuat presiden Jokowi kelimpungan dengan memanggil semua pemegang kebijakan fiskal, moneter hingga pelaku pasar. Berbagai kebijakan fiskal dilakukan untuk menahan efek 'letoy' nya rupiah, mulai dari pemberian *tax holiday*, bebas pajak untuk sektor pariwisata, Dana Rp10 triliun untuk *buy back* saham BUMN, bahkan menggenjot pajak dan cukai

Foto double exposure pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melalui layar ditutup menguat pada level 4.237,73 atau naik tipis 9,232 poin di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (26/8). Pemerintah melalui perusahaan BUMN menggelontorkan dana Rp10 triliun untuk pembelian saham kembali di pasar modal guna meningkatkan harga saham yang sedang anjlok.

dalam negeri dilakukan Jokowi. Namun, sepertinya Rupiah tetap tidak bergerak ke level di bawah Rp14.000 atau bahkan di bawah level Rp10.000.

Bisnis ritel pun tidak terlepas dari efek pelemahan Rupiah. Peritel akan mengerek harga jual maksimal 5 persen. Produk barang yang bakal naik antara lain sabun, deterjen, susu dan biskuit. Kenaikan tersebut terjadi karena pada saat berbelanja barang modal bertepatan dengan kurs rupiah yang melemah. Alhasil,



Menkeu Bambang Brodjonegoro (kedua kanan), Menko Perekonomian Damin Nasution (kanan), Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kiri) dan Seskab Pramono Anung (kedua kiri) memberi keterangan pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8).

maka pengeluaran biaya (*cost*) akan membengkak. Ujungnya, mau tidak mau harga barang akan naik.

Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menilai ekonomi di tingkat dunia dan kawasan mengalami gejolak dan tekanan. Begitu pula dengan ekonomi Indonesia, itu semua harus diakuai secara terbuka dan jujur.

Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi tiga hal saat ini, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal terakhir, inflasi, dan mulai munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja.

"Pertumbuhan ekonomi harus dijaga dan jangan meluncur ke bawah. Namun, diharapkan naik, kalau pertumbuhan ekonomi dari 6 menjadi 5, lalu 4 maka berpengaruh pada semua kehidupan," jelasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Turun, Serapan Anggaran Rendah

Dalam data yang disampaikan, Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I tahun 2015 menghadapi tantangan yang cukup berat akibat turunnya optimisme perekonomian global, ketidakpastian penurunan suku bunga The Fed, melemahnya

ekonomi Tiongkok serta terjadinya krisis di Yunani.

Pada semester pertama 2015, Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp771,4 triliun atau 43,8 persen dari target dalam APBN 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp621,0 triliun, atau 41,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.489,3 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2015 menghadapi tantangan yang berarti," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Asumsi dasar ekonomi makro, berdasarkan data yang disampaikan Menkeu Bambang Brodjonegoro, mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7 persen, tingkat inflasi 7,26 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS rata-rata Rp13.022/USD, Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,8 persen, Harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD55/barel, lifting minyak rata-rata 762 ribu barel/hari, dan lifting gas rata-rata 1.171 ribu barel setara minyak/hari.

Pencapaian penerimaan pajak disumbang oleh penerimaan pajak penghasilan migas, non-migas, pajak pertambahan nilai, serta penerimaan bea dan cukai.

Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp150,2 triliun, atau 55,8 persen dari target Rp269,1 triliun, atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya di periode yang sama pada tahun 2014 yang mencapai 53,3 persen.

Realisasi belanja negara mencapai Rp913,5 triliun, atau 46,0 persen dari pagu belanja negara sebesar Rp1.984,1 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja Pemerintah pusat dan transfer ke daerah & dana desa. Realisasi belanja Pemerintah pusat mencapai Rp524,1 triliun, atau 39,7 persen dari pagu Rp1.319,5 triliun. Realisasi belanja Pemerintah pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyerapan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) yang sampai dengan 31 Juli 2015 telah mencapai Rp261,0 triliun, lebih tinggi dibanding realisasi dengan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp230,0 triliun.

Kemenkeu menilai penyerapan belanja modal akan meningkat seiring dengan selesainya proses pelelangan pada K/L, dokumen DIPA APBNP 2015, dan proses restrukturisasi organisasi/nomenklatur di beberapa K/L.

"Dengan realisasi pendapatan negara Rp771,4 triliun dan realisasi belanja negara Rp913,5 triliun, maka realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBNP tahun 2015 mencapai Rp142,0 triliun (1,22 persen dari PDB)," jelasnya.

Realisasi pembiayaan mencapai Rp207,5 triliun, atau 93,2 persen dari target Rp222,5 triliun. Hal ini terkait dengan kebijakan *front loading* dalam pembiayaan anggaran. Strategi pemenuhan kekurangan pembiayaan dengan pinjaman luar negeri (bilateral

dan multilateral) ditujukan untuk mengurangi beban penerbitan SBN. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (netto) sebesar Rp234,4 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp26,9 triliun. Realisasi pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan 15 Juli 2015 adalah sebesar Rp7,1 Triliun. Sisa PMN yang belum dicairkan diperkirakan dapat dicairkan seluruhnya pada periode Agustus sampai dengan Desember 2015, menunggu penerbitan PP untuk masing-masing PMN kepada BUMN/Lembaga yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Dilema Otoritas Moneter Jaga Kurs Rupiah

Lain halnya dengan pemegang otoritas Fiskal, Bank Indonesia mengungkapkan Defisit transaksi berjalan triwulan II-2015 tercatat USD4,5 miliar atau 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih baik dibandingkan dengan defisit pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar USD9,6 miliar atau 4,3% dari PDB. Peningkatan kinerja transaksi berjalan tersebut ditopang oleh penurunan impor nonmigas sebesar -15,8% (yoy) seiring dengan melambatnya permintaan domestik. Meskipun ekspor nonmigas mengalami penurunan sebesar -5,3% (yoy) kinerja ekspor nonmigas mengalami peningkatan volume ekspor 7,7% (yoy).

Di sisi migas, defisit neraca perdagangan migas tercatat lebih rendah akibat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Penurunan defisit neraca pendapatan primer didorong penurunan pembayaran dividen dan bagian laba investor asing. Hal ini terjadi karena berkurangnya kepemilikan asing atas saham domestik dan melambatnya kinerja korporasi.

"Transaksi modal dan finansial triwulan II-2015 masih mencatat surplus sebesar USD2,5 miliar di tengah ketidakpastian ekonomi



global. Namun demikian, surplus tersebut lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya, terutama karena menyusutnya surplus investasi portofolio dan investasi lainnya yang mengalami defisit," ujar Direktur Eksekutif, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara di Jakarta.

Penyusutan surplus investasi portofolio disebabkan oleh net jual asing atas saham domestik dan lebih rendahnya net beli asing atas surat utang pemerintah. Sementara investasi lainnya mengalami defisit, terutama karena menurunnya penarikan pinjaman luar negeri oleh korporasi, sejalan dengan moderasi

perekonomian domestik, di tengah pembayaran pinjaman yang tetap tinggi sesuai dengan jadwalnya.

"Overall balance Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II-2015 mengalami defisit sebesar USD2,9 miliar. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia akhir Agustus 2015 sebesar USD105,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2015 sebesar USD107,6 miliar," tambahnya.

Dengan perkembangan tersebut, lanjut Tirta, posisi cadangan devisa per akhir Agustus 2015 masih cukup membiayai 7,1 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran



Petugas menghitung pecahan Dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (12/8).

utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Untuk mengukur daya tahan terhadap guncangan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, Bank Indonesia melakukan uji ketahanan (*stress test*) dengan skenario terburuk pelemahan nilai tukar. Berdasarkan hasil *stress test* ketahanan korporasi swasta non bank yang memiliki ULN menunjukkan bahwa dari 91 korporasi yang memiliki ULN dan posisi Net Foreign Liabilities (NFL)

dengan data per triwulan II 2014 diperkirakan terdapat 7 korporasi atau 8,77% dari total korporasi yang di-observasi berpotensi insolvent (*equity negatif*) apabila nilai tukar Rupiah melemah sampai dengan kurs Rp15.500/USD.

“Pengujian dengan skenario Rp15.500/USD tolong jangan diartikan bahwa angka tersebut adalah level toleransi BI. Kami juga menguji dengan berbagai variasi angka. Intinya, kami tidak menetapkan level tertentu dalam stabilitasi nilai tukar rupiah,” ujar Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah pada 9 Januari 2015 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.

Dampak lain dari pelemahan rupiah yaitu pengurangan jam kerja pekerja/buruh di perusahaan padat karya. Sebanyak 13 perusahaan di Pekalongan yang tergabung dalam padat karya sudah mengurangi jam kerja selama 4 jam. Sekretaris Serikat Pekerja Nasional (SPN) kota Pekalongan Dhamirin mengatakan, secara akumulatif rata-rata jam kerja selama satu minggu 46 jam menjadi 40 jam kerja normal. Hal tersebut disebabkan melemahnya rupiah yang menembus angka Rp14.400 per dolar AS.

“Secara otomatis pengurangan jam kerja mempengaruhi pendapatan buruh/karyawan. Setiap hari dikurangi 4 jam. Jadi, kerjanya cuma setengah hari,” ujar Dhamirin.

Di sektor perbankan sendiri, untuk mengurangi “larinya uang dolar AS”, Bank Indonesia mengubah batas nilai maksimum pembelian valas melalui transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (*underlying*), dari sebelumnya sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat per-bulan per-nasabah/pihak asing menjadi sebesar 25.000 dolar AS atau ekuivalennya per-bulan per-nasabah.

“Dengan demikian, pembelian valas di atas 25.000 dolar AS diwajibkan memiliki *underlying* transaksi berupa seluruh kegiatan perdagangan dan investasi,” tambah

Tirta Segara.

Selain itu, BI mengatur pula bahwa apabila nominal *underlying* transaksi tidak dalam kelipatan 5.000 dollar AS, akan dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan 5.000 dollar AS.

Bank Indonesia menegaskan bahwa transaksi yang memiliki *underlying*, seperti untuk keperluan mengimpor barang, membayar uang sekolah dan biaya pengobatan di luar negeri, atau pembayaran utang luar negeri, tidak akan diberlakukan pembatasan.

“Kebijakan pembatasan pembelian valas transaksi tanpa *underlying* tersebut, dilakukan BI sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah mengingat masih banyak terdapatnya permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan ekonomi riil (tanpa *underlying* transaksi), yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valas, dan mengarah pada kegiatan spekulasi,” ujar Tirta.

Namun, pada sisi yang lain, pengamat AEPI Salamudin Daeng mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015, menurun menjadi 4,67 persen pada kuartal II 2015, hal itu merupakan laju pertumbuhan paling lambat sejak 2009.

“Terlebih, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD dan menembus level Rp14.000, akan menambah beban defisit neraca pembayaran dan defisit pendapatan primer yang bersumber dari pembayaran bunga utang, cicilan utang pokok utang luar negeri dan aliran modal ke luar negeri,” kata Salamuddin.

Dengan kondisi yang seperti ini, kata dia, akan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia sendiri akibat larinya para investor.

“Hanya orang gila yang mau berinvestasi dan memborong portofolio di Indonesia. Karena *yield*-nya saja sudah negatif,” ujar dia.◻

Ismed Eka Kusuma

Badai (tidak) Pasti Berlalu

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita. Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian

nasional adalah masalah paling utama.

Sekarang ini, siklus perekonomian global maupun nasional (memang) kurang menggembirakan. Guncangan ekonomi seperti itu bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami berulang kali. Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat.

Potongan pidato kenegaraan itu disampaikan Presiden Joko Widodo,

Jumat 14 Agustus 2015 lalu. Di hadapan seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilannya di DPR RI dan DPD RI. Pidato resmi dalam rangka memperingati HUT RI ke-70.

Di hari itu, saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, nilai tukar dolar terhadap rupiah sudah melemah menyentuh harga Rp 13.787. Besaran nilai tukar rupiah



ini membuat kondisi perekonomian Indonesia sudah masuk taraf mengkhawatirkan.

Terlewatnya ambang batas normal (*overshoot*) nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berimbas pada roda perekonomian nasional, diyakini Presiden bakal berlalu. Istana sudah bergerak cepat dengan merombak Kabinet Kerja. Slogannya Kerja, Kerja

dan Kerja.

Berkejaran dengan waktu dan harapan rakyat yang membumbung tinggi, Rabu 12 Agustus 2015, tercatat enam anggota Kabinet Kerja dirombak/diganti. Itu setelah masukan demi masukan dialamatkan kepada tim ekonomi pemerintah yang dinilai lemah.

Mereka adalah Menko

Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Seskab Andi Widjajanto dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Dari keenamnya, satu yang selamat. Sofyan Djalil. Ia hanya digeser menggantikan peran Andrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

“Fokus utama saat ini kan pada keadaan ekonomi yang harus diperkuat, didukung situasi yang lain. Pondasi ekonomi harus ditopang pondasi yang lain, termasuk Polhukam dan Maritim,” kata Mensesneg Pratikno.

Harapannya, dengan adanya perombakan kabinet maka kondisi perekonomian nasional akan semakin membaik. Namun, perombakan kabinet tersebut tetap dirasa belum cukup. Sebab, hal yang melatarbelakangi *reshuffle* kabinet adalah kegaduhan politik yang diciptakan pemerintah sendiri.

Kata Tantowi Yahya, Ketua DPP Golkar Kamis pekan lalu, kegaduhan politik turut membuat situasi ekonomi tidak kondusif. Bagaimanapun, menurutnya, situasi ekonomi tidak mungkin bisa berjalan dengan baik apabila terjadi instabilitas politik.

“Itu dua sisi mata uang. Tidak mungkin ekonomi jalan, bila stabilitas politik tidak ada. Tolong buktikan negara mana morat-marit politik, ekonominya jalan?” jelasnya.

“Kalau kita lihat, *reshuffle* itu tidak serta-merta memperbaiki sistem ekonomi kita. Lihat saja laju dolar pada rupiah tidak bisa dihentikan. Ancaman PHK tetap ada terus. *Reshuffle* itu bukan merupakan obat *cespleng*,” lanjut Tantowi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Pusat Krisis Pemerintah

Partai Golkar mengusulkan dibentuknya pusat krisis ekonomi nasional dalam mengatasi berbagai

permasalahan yang muncul. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga menyentuh angka Rp 14.000, menurut Ketum Golkar Aburizal Bakrie sudah masuk kategori membahayakan perekonomian nasional.

Dunia usaha terkena imbas akibat melemahnya dinilai tukar rupiah. Pahitnya, mereka pada gilirannya akan merumahkan karyawannya. Pemerintah diminta tidak hanya memfokuskan penyerapan anggaran pada Semester II Tahun 2015.

Pusat krisis yang nantinya dibentuk, diisi oleh tokoh-tokoh handal yang mengkoordinasikan berbagai permasalahan dengan kementerian terkait perlambatan ekonomi. Utamanya dari kalangan profesional lintas partai yang mempunyai integritas kebangsaan.

Partai Amanat Nasional dalam peringatan HUT PAN ke-17 di Bandung, Minggu pekan lalu, menyampaikan hal serupa. Melalui Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan PAN, meminta Presiden Jokowi mengadakan musyawarah nasional guna mencari solusi dan jalan keluar atas krisis perekonomian nasional.

Jokowi sebagai kepala negara mengingatkan Amien agar bersedia membuka tangan dengan mengundang seluruh tokoh bangsa, pimpinan lembaga negara, pimpinan TNI, Polri, termasuk partai politik di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Partai Demokrat tidak ketinggalan. Dari kediamannya di Cikeas, Kamis pekan lalu, Ketum Demokrat yang juga Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono urun rembug terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK.

Didampingi istrinya, Ani Yudhoyono, Sudi Silalahi, Amir Syamsuddin, Roy Suryo, Edhie

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) saat berunjuk rasa di Semarang, Jateng, Selasa (1/9). Mereka menolak adanya PHK akibat kenaikan nilai dolar terhadap rupiah serta Permenaker No. 16 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Tenaga Kerja Asing.





Baskoro Yudhoyono dan petinggi Demokrat lainnya, SBY dengan runut menjabarkan bagaimana mengatasi krisis ekonomi 2008.

Penekanannya adalah bagaimana pemerintah melindungi rakyat yang terkena dampak krisis berikut usaha mencegah terjadinya PHK. Kondisi perekonomian sekarang dikatakan berbeda situasinya dengan krisis 2008. Krisis ekonomi pemerintahan Jokowi-JK aspek fundamentalnya lebih baik dibandingkan krisis 2008.

Meski begitu, langkah antifipatif menjadi penting untuk menjaga berbagai kemungkinan. SBY memberikan resep jitu dalam mengatasi sekaligus menjaga perekonomian nasional. Resep jitu dituangkan dalam enam pointer besar.

Pertama agar pemerintah tetap menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jangan sampai yang awalnya menyentuh pada angka 6 persen akan turun hingga di bawah angka 4 persen.

“Kalau pada awalnya 6 persen jadi 5 persen dan jadi 4 persen atau lebih rendah, hal tersebut akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita semua dengan menurunnya angka tersebut pengangguran akan terjadi dan kemiskinan akan meningkat,” kata SBY.

Kedua, pemerintah harus menjaga sisi *demand* dan memastikan keadaan rakyat masih mampu untuk membeli kebutuhan hidup untuk setiap harinya. Langkah pemerintah misalnya dengan mengeluarkan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang sehari-hari bisa dilakukan.

Ketiga, pemerintah harus menjaga kestabilan harga yang saat ini sedang melambung tinggi. Dicontohkan harga daging sapi yang sekarang melonjak menjadi 130 ribu per kilogram.

Resep keempat, lanjut SBY, pemerintah harus memberikan insentif fiskal pada seluruh pengusaha di tengah iklim investasi yang saat ini sedang kurang baik.

Kelima, pemerintah perlu mengontrol tentang gelombang PHK yang banyak dilakukan oleh pengusaha ditengah gejolak ekonomi saat ini. Menurutnya, semakin banyak karyawan yang di PHK semakin banyak pengangguran yang ada di Indonesia dan itu akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Terakhir SBY memberikan masukan agar pemerintah perlu menjaga nilai tukar Rupiah agar tidak merosot terus dan berada diambang keterpurukan dari dolar Amerika.◦

Soemitro-Soekardjito

Krisis Ekonomi Berpotensi Dimainkan Negara-Negara Adidaya

Beberapa hari lalu, ada kejadian menarik meski terkesan rutin dan hal yang biasa. Markas ABC (radio dan tv Australia) yang selama ini berkantor di Bangkok-Thailand untuk meliput kawasan Asia Tenggara, tiba-tiba kantornya dipindah ke Jakarta.

Di hari yang sama, kantor CNN Asia yang berkantor di Sidney, Australia, kantornya juga dipindah Jakarta. Padahal CNN biro Indonesia sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi apa yang sebenarnya mendasari keputusan ABC maupun CNN memindahkan kantornya ke Jakarta?

Dari sudut pandang jurnalistik, keputusan memindahkan sebuah kantor berita ke suatu tempat, biasanya karena *magnitude* beritanya jauh lebih menarik dibanding tempat lainnya. Dan itu biasanya, karena mereka melalui *feeling* jurnalistiknya, meyakini akan ada peristiwa yang luar biasa dan pastinya punya nilai berita. Namun kiranya itu baru sebagian dari cerita.

Fakta bahwa CNN merupakan stasiun TV Amerika Serikat dan ABC merupakan media garis depan yang seringkali menyuarakan kebijakan dalam dan luar negeri Australia, tak pelak lagi hal ini tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang biasa-biasa saja. Dua kejadian ini menggambarkan adanya fokus perhatian yang intensif dari AS dan Australia terhadap Indonesia. Apalagi

dengan kedatangan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi.

Sepertinya ada sesuatu yang sedang menggelisahkan kekuatan-kekuatan korporasi global baik di AS maupun di Uni Eropa terkait arah kebijakan maupun gaya

kepemimpinan Jokowi yang penuh ketidakpastian.

Dalam pertemuan antara Christine dan Jokowi memang terkesan tak ada agenda membahas soal utang Indonesia kepada IMF. Namun seperti juga dilansir berbagai media, IMF sepertinya justru melancarkan ancaman terselubung yang tak kalah mengerikan saat



Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde (kiri) berdialog dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro (ketiga kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9).

bertemu Jokowi. Lagarde mengakui bahwa di dunia tengah terjadi dua sentimen besar yaitu rencana kenaikan suku bunga The Fed (The Federal Reserve, Bank Sentral AS) dan devaluasi Yuan yang dilakukan Tiongkok.

Padahal kita tahu, setiap kali the Fed mencanangkan kenaikan suku bunga, pasti akan disusul dengan gonjang-ganjing ekonomi termasuk anjlognya mata uang Rupiah, padahal kebijakan kenaikan suku bunga itu sendiri sama sekali belum dilaksanakan.

Masuk akal jika dalam pertemuan antara tim ekonomi Jokowi dan IMF disinggung juga soal rencana the Fed yang rencananya akan dilakukan tahun ini. Seperti diakui juga oleh Menteri Keuangan Bambang

Brojonegoro, pihak pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan the Fed ini sebaiknya ditunda sampai awal tahun depan.

Namun keliru jika permohonan itu bergantung pada Christine Lagarde. Karena baik IMF maupun the Fed, yang mengendalikan arah kebijakan strategisnya adalah sekitar 600 korporasi global yang dikuasai oleh dinasti Rockefeller, Rotschild dan JP Morgan. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde tak lebih sekadar juru bicara kekuatan ekonomi dan keuangan global tersebut.

Agaknya, kepentingan-kepentingan korporasi global tersebut sedang tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa hari berselang, mantan koresponden majalah Far Eastern Economic Review John McBeth, menulis di situs Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Salah satunya McBeth menulis: "Ekonomi Nasionalis Pertumbuhan. Kritik Presiden Joko Widodo di forum Konferensi Asia Afrika memang membuat senang kelompok nasionalis, tapi Indonesia tidak melakukan apa-apa untuk menarik investasi asing."

Dalam gambaran McBeth, terkesan hendak mengatakan era pemerintahan SBY lebih baik. Di era Presiden SBY, pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mencanangkan pertumbuhan 5,8 persen. Kini, proyeksi pertumbuhan ekonomi turun antara 5,2 sampai 5,3 persen, dan kemungkinan terus turun dalam beberapa bulan ke depan.

Lantas McBeth melaporkan proyeksi IMF bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,7 persen pada kuartal pertama, terendah sejak 2009.

Melalui artikelnya ini, bisa dipastikan McBeth mewakili kekusaran berbagai kalangan strategis dan pemain kunci di sektor ekonomi dan moneter global. Pertama, seluruh ketidakbecusan Jokowi dalam mengelola perekonomian nasional, gara-gara pemerintahannya



dipandang berhaluan nasionalis. Meski penggambaran ketidakbecusan Jokowi dalam mengelola pemerintahan khususnya di bidang ekonomi, tentu saja penggiringan opini John McBeth bahwa hal itu gara-gara Jokowi itu nasionalis, barang tentu sudah salah kaprah dan tendensius. Apalagi dengan mengaitkan kritik Jokowi terhadap IMF dan Bank Dunia pada Konferensi Asia-Afrika telah membuat senang kaum nasionalis sebagai tolok ukur bahwa mantan gubernur DKI Jakarta ini sudah membuktikan komitmen nasionalismenya. Padahal banyak kalangan nasionalis justru masih menilai pidato Jokowi di KAA itu masih berupa retorika dan belum menyentuh substansi.

Selain itu langkah-langkah strategis pemerintahan Jokowi-JK justru dipandang belum menunjukkan komitmennya untuk memenuhi janji politik kampanyenya yaitu: Bertumpu pada Nawacita dan Trisakti. Bahkan kalangan nasionalis berpandangan bahwa ketidakjelasan komitmen Jokowi pada Nawacita dan Trisakti itulah yang justru menyebabkan terjadinya kisruh dan mismanajemen dalam tata kelola perekonomian nasional dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Kedua, dengan mempertunjukkan era pemerintahan SBY jauh lebih baik dari segi performa ekonomi, McBeth seakan hendak mengirim pesan bahwa pemerintahan terdahulu lebih



mewakili kepentingan-kepentingan strategis global pihak AS dan Uni Eropa.

Tapi ya harap maklum, pandangan John McBeth bisa dibaca sebagai bentuk kekusaran dan ketidakpuasan di kalangan strategis pengambilan keputusan di Washington.

Oh ya satu lagi, meski ini tersirat dan tidak tersurat, bahwa kebijakan Jokowi-JK yang berkiblat ke Tiongkok, telah memicu kekusaran pihak barat. Dengan kata lain, di tengah-tengah persaingan global AS versus Tiongkok di kawasan Asia Pasifik yang semakin tajam, termasuk dalam bidang ekonomi, pihak AS dan Uni Eropa nampaknya menilai Jokowi bukan merupakan sekutu yang bisa diandalkan. Setidaknya, ketidakpastian yang jadi karakteristik pemerintahannya pada perkembangannya akan merugikan kepentingan-kepentingan AS dan Uni Eropa. Bagi mereka, kepastian adalah di atas segalanya.

Geopolitik Indonesia, Sasaran Proxy War AS versus Cina

Punya potensi ekonomi dan demografi yang strategis, Indonesia jadi incaran kepentingan negara-negara adidaya baik dari AS-Uni Eropa, Jepang, maupun Tiongkok.

Betapa tidak. Pertama, ada sekitar 40-an juta ton cargo melintas, dan 21-an juta barel melewati perairan Indonesia (bandingkan dengan Selat Hormuz yang hanya 17 juta, atau Selat Malaka 15 juta barel, dll) dari Timur Tengah ke Asia Pasifik, di mana dekade 2030-an diprediksi akan meningkat dua kali lipat;

Kedua, selain hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, ia pun dapat membahayakan pemanasan global (karena kontribusi 2 % perusak hutan), juga berlimpahnya energi alternatif semacam panas bumi, *hydro*, solar, angin dan biodiesel dari tumbuhan (jarak, sagu, tebu, ubi kayu, dll) termasuk ethanol, alkohol dsb hampir semua ada serta berlimpah di Indonesia;

Ketiga, fakta yang tak boleh



KRI Silas Papare-386 berlayar di perairan Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Selasa (18/8).

dipungkiri bahwa Indonesia itu penghasil lada putih nomor 1 (satu) di dunia, produsen kayu lapis terbesar, penghasil puli dari buah pala terbaik di dunia, LNG terbesar, dan juga penghasil lada hitam, karet alam, minyak sawit (CPO), timah ---- untuk tiga komoditas terakhir ini terbesar kedua di dunia;

Keempat, fakta-fakta lainnya bahwa ia merupakan negara penghasil tembaga nomor tiga di dunia, penghasil kopi dan karet sintetik keempat, selain penduduknya juga menempati urutan keempat terbesar di muka bumi;

Kelima, selain itu, sebagai negara agraris juga memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, saat ini Indonesia dinilai sebagai penghasil ikan nomor enam di dunia, termasuk teh, biji-bijian, dan lain-lain;

Keenam, untuk hasil tambang jangan ditanya lagi, sebagai negeri *ring of fire* (lingkaran sabuk api) maka berbagai jenis dan aneka tambang pasti berserak di negeri ini, seperti natural gas, emas, batu bara - ketiganya nomor enam di dunia. Indonesia juga penghasil minyak bumi nomor sebelas di dunia (data minyak ini perlu *cross check* kembali), kemudian juga penghasil

aspal, bauksit, nikel, granit, perak, uranium, marmer dan mineral ikutannya serta pasir besi dengan kualitas terbaik di dunia;

Ketujuh, selain potensi pariwisata yang besar baik berupa pemandangan alam, beberapa pantainya mempunyai ombak terbaik di dunia untuk *surfing*, kemudian adat, budaya dan banyaknya situs serta artefak kejayaan masa lalu masih terawat baik, bahkan temuan terbaru perihwal artefak kejayaan nusantara (Piramida Gunung Padang) bakal mengubah dunia, bahkan mungkin dapat merobek buku sejarah sejak halaman pertama - juga tak lupa ialah *local wisdom* bangsa ini berupa keramah-tamahan warga lokal terhadap pendatang (*tourist*) kendati nilai-nilai tersebut kini telah mulai luntur karena faktor lingkungan yang berubah serta tak terbandung.

Potensi dan Dahsyatnya Geoposisi Silang

Aktor geoposisi silang di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia adalah kawasan yang mutlak harus kondusif, aman dan nyaman bagi keberlangsungan hilir mudik pelayaran lintas negara bahkan antarbenua. Betapa 80% perdagangan dunia melintasi perairan dan selat-selat di Indonesia. Menurut Dirgo D Purbo, pakar

perminyakan, bahwa 50% yang melintas di perairan Indonesia adalah tanker-tanker minyak dunia. Data di Lemhanas RI, “Hampir 50 % perdagangan laut komersial dunia dilakukan melalui perairan Indonesia dan perairan regional kawasan ini. Hampir dipastikan bahwa negara-negara lain sebagai pengguna jalur strategis ini memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi perdagangan internasional,” ungkap Gubernur Lemhanas, Prof Dr Ir Budi Susilo Soepandji dalam seminar nasional yang digelar GMNI di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (3/5/2014).

Dalam perspektif kolonialisme global, bahwa takdir geopolitik yang menggiurkan (potensi ekonomi, demografi dan geoposisi silang), niscaya akan menempatkan Indonesia pada posisi: (1) sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju; (2) sebagai pasar bagi barang-barang jadi yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju; dan (3) sebagai pasar guna memutar ulang kelebihan kapital yang diakumulasi oleh negara-negara industri maju tersebut (Bung Karno, 1955). Inilah yang tampaknya tengah berlangsung masif dan sistematis.

Secara geostrategi, kedahsyatan geoposisi silang yang jarang dimiliki negara manapun meniscayakan Indonesia berdaya tawar tinggi di panggung (politik) global. Ia mampu merajut hubungan dengan berbagai negara di antara dua benua dan samudera. Dan yang terpenting, Indonesia mampu memegang posisi kunci di antara negara-negara tersebut di satu sisi, namun pada sisi lain, bisa ‘diplokoto’ (diperkuda) apabila para elitnya abai geopolitik - mungkin hanya dijadikan *buffer zone* (wilayah penyangga), atau jangan-jangan cuma diletakan sebagai *proxy war* (lapangan tempur) bagi kepentingan negara-negara lain. Silakan pilih mana atau mau jadi apa, tergantung geostrategi dan *policy* pemerintah serta bagaimana anak bangsa ini menyikapi secara cerdas takdir geopolitik tersebut.



Tak dapat disangkal, keberadaan di pusaran serta lintasan antara dua samudera di jalur pelayaran (serta penerbangan) internasional, memastikan pelabuhan-pelabuhannya baik pelabuhan laut maupun bandar udaranya menjadi persinggahan atau titik transit strategis bagi hilir-mudik pelayaran dan penerbangan jenis apapun di dunia. Inilah urgensi simpul-simpul transportasi pada (geo) posisi silang. Data menggambarkan, bahwa Indonesia memiliki 39 selat, dimana 4 selatnya termasuk *chokepoints shipping* dari sembilan *chokepoints* dunia sebagaimana diulas di atas.

Pada tataran inilah AS, Uni Eropa, Australia, Jepang, dan bahkan Tiongkok, menyadari betul kekuatan dan nilai strategis geopolitik Indonesia.

Australia misalnya, ia akan menjerit jika Indonesia “tidak aman” sebab hampir 80% APBN-nya tergantung Indonesia. Belum lagi Tiongkok, atau Jepang, Amerika, Prancis, dan lain-lain. Sistem transportasi ekspor impor negara-negara akan terganggu, “pasar”-nya lenyap, pasokan bahan baku untuk keperluan industri akan tersendat, atau aktivitas putar ulang kapital akan berhenti, dan lainnya.

Kedahsyatan takdir geopolitik tadi --- selain dapat meletakkan

Indonesia sebagai aktor kunci dalam setiap kerjasama apapun di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik, tak boleh disangkal bahwa ia juga akan menjadi ‘kawasan tujuan kolonialisme (dan imperialisme)’ negara manapun, siapapun, dan kapanpun untuk mengeksploitasi, menguasai dan mencaplok baik SDA maupun aspek-aspek ekonomi lainnya. Hal inilah yang harus dikenali serta disadari bersama oleh berbagai elemen bangsa. Tak boleh tidak. Akan tetapi karena faktor geoposisi silang, maka modus dan pola imperialisme para negara (adidaya) dipastikan akan secara non militer (*asymmetric warfare*), bukan secara militer (*hard power*) sebagaimana terjadi di Irak, Afghanistan, Libya, Syria, dan lain-lain.

Di sinilah krisis ekonomi nasional kita sebagai imbas dari krisis moneter global seperti pada 2008 lalu, tidak boleh sekadar dibaca sebagai krisis ekonomi. Ada temali erat dengan aspek Politik-Ekonomi-Sosial-Budaya dan Hankam.

Bahwa krisis ekonomi pada gilirannya dimainkan sebagai bagian dari Perang Asimetrik yang dilancarkan negara-negara adidaya tersebut untuk melemahkan Indonesia, lalu kemudian menguasainya.

Inilah ancaman bangsa kita yang sesungguhnya. Bahwa Indonesia sasaran imperialisme dan kolonialisme global karena faktor geopolitiknya, maka pola serta modus peperangan asimetris yang dimainkan Negara-negara besar mutlak harus diajarkan kepada seluruh komponen strategis bangsa.

Hal ini dilatar-belakangi keprihatinan, bahwa Indonesia kemarin, kini dan mungkin ke depan - tengah dijadikan ajang medan tempur (*proxy war*) oleh para adidaya secara asimetris (nirmiliter), tetapi justru banyak tokoh agama, tokoh adat, kaum akademisi, generasi muda, tak menyadari bahkan larut pada skema yang sedang dijalankan oleh kepentingan asing. ◉ Hendraji



Bongkar Cessie BPPN dan kejar “Setoran” ala Kejagung

Tindakan Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI) dalam perkara dugaan korupsi hak tagih (cessie) Bank Tabungan Negara (BPN) berbuntut panjang. Pihak PT VSI mengadukan Kops pimpinan HM Prasetyo cs ke DPR RI. Pasalnya dalam penggeledahan Rabu 12 Agustus tim jaksa yang dipimpin oleh Sarjono Turin salah menggeledah tempat yang menjadi subyek perkara. “Tim yang mengaku Satuan Tugas Khusus saat menggeledah tidak menunjukkan identitas, surat perintah penggeledahan serta izin dari pengadilan negeri setempat, maka

kami memohon perlindungan hukum dan keadilan serta jaminan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia,” kata Direktur Victoria Securities Indonesia Yangky Halim, dalam surat pengaduan ke DPR, Senin (17/8).

Kesalahan tempat penggeledahan terjadi karena aset yang dipermasalahkan sebagai hak tagih BTN yang dibeli dari Badan Penyelahan Perbankan Nasional (BPPN) adalah milik Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC) yang berbadan hukum asing. “Kami yakin dan percaya bahwa kantor/perusahaan kami tidak ada hubungan dengan VSIC. Akan tetapi kami bingung mengapa justru kantor kami yang digeledah dan barang-barang milik kantor kami yang disita,” ujarnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo, saat ditanyai wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015). Prasetyo dipanggil DPR terkait penggeledahan PT Victoria Securities Indonesia oleh Kejaksaan Agung.

Terlebih surat izin penggeledahan yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mengizinkan penggeledahan di kantor VSIC yang terletak di Panin Bank Center Lt 9 Jl Jenderal Sudirman, Kav I Senayan, Jakarta. Serta kantor VS di gedung yang sama. Namun yang terjadi justru kantor VS di Senayan City, Panin Tower lantai 8 Jalan Asia Afrika yang digeledah. “Jelas tindakan penggeledahan dan penyitaan ini salah obyek dan subyek, serta

tidaknkan yang sewenang-wenang yang tidak berlandaskan hukum,” ujarnya.

Yangky menambahkan akibat tindakan pengeledahan tersebut sejumlah karyawan PT VSI mengalami trauma karena intimidasi dari petugas. “Bahkan akibat tindakan-tindakan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku Satgas Pemberantasan Korupsi tersebut, terlebih lagi dengan sengaja diundangnya wartawan saat pengeledahan, dengan pemberitaan yang menyudutkan PT VS Indonesia, tanpa adanya penjelasan mengenai pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, telah merusak reputasi dan citra PT VS Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia dan telah menghambat kerja pegawai kami,” kata Yangky.

Selain melaporkan ke DPR, PT

VS Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Panjaitan. Sementara itu pihak Polda Metro Jaya membantah telah ikut terlibat dalam pengeledahan di kantor PT VS Indonesia. “Tidak ada, kita tidak ikut, itu kan Kejaksaan Agung. Saya sudah bantah itu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal, saat di konfirmasi, Senin (17/8).

Belakangan berdasarkan informasi yang diterima Majalah Aktual.com, Jampidsus Widy R Pramono bahkan tidak ikut dilibatkan dalam aksi pengeledahan tersebut. Widy baru mendapatkan informasi pukul 07.00 pasca pengeledahan.

Seperti diberitakan sebelumnya Kejaksaan Agung diwakili oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penyidikan

pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Sardjono Turin menyatakan, jajarannya menduga, perkara macetnya hak tagih atau cessie di PT VSI melibatkan oknum Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dia menyatakan, indikasi tersebut terjadi karena kesengajaan melelang aset dengan harga sangat murah.

Sardjono menuturkan, untuk mengungkap rangkaian penyimpangan hak tagih ini, pihaknya telah mengeledah kantor PT VS di Wisma Panin, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pengeledahan tersebut jaksa menyita sejumlah dokumen dan komputer.

Kronologis Hutang

Pimpinan DPR cepat merespon pengaduan PT VSI. Respon cepat ini lantaran DPR tidak menginginkan kasus yang disidik oleh Kejaksaan Agung dapat memicu krisis ekonomi, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pekan lalu Jumat (21/8) Pimpinan DPR memanggil Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menindaklanjuti pengaduan VSI.

Dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung datang beserta jajarannya menggelar pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Hadir pula dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR Fadil Zon dan Fahri Hamzah.

Usai menggelar pertemuan tertutup Fadli mengatakan pihaknya mempertanyakan langkah Kejaksaan Agung menelusuri pembelian aset yang terjadi pada tahun 2003 tersebut. “Ini kan kasus lama, kasus BPPN yang sudah dari tahun 2002, 2003. Ini kenapa diangkat baru sekarang? Kenapa diangkat sekarang? Seperti membuka kontak pandora,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai menghadiri pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (21/8).

Perkara penjualan aset perbankan oleh BPPN memang bukan perkara baru bagi Kejaksaan Agung. Ini merupakan rangkaian dari kebijakan pemerintah saat Indonesia terjerat krisis moneter pada tahun

KEJAKSAAN AGUNG RI TINDAK PIDANA KHUSUS “UNTUK KEADILAN”

BA - 16

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu lima Belas, bertempat di Kantor Victoria Securities Lt. 8 Panin Tower, Gedung Senayan City, Kami Jaksa Penyidik :-----

1. Nama : AGUS WIDODO, SH, MH
Pangkat/NIP : Jaksa Madya /19680909 198903 1001
Jabatan : Jaksa Pada Kejaksaan Agung RI
2. Nama : MUHAMMAD ZUBAIR, SH, MH
Pangkat/NIP : Jaksa Muda /19770708 200112 1003
Jabatan : Jaksa Pada Kejaksaan Agung RI
3. Nama : FAUZAL, SH, MH
Pangkat/NIP : Jaksa Muda /19760821 200112 1003
Jabatan : Jaksa Pada Kejaksaan Agung RI

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 61/F.2/Fd.1/07/2015 tanggal 29 Juli 2015, perkara Tindak Pidana Korupsi dalam penjualan tiga hak tagih/cessie oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tahun 2003 Kepada Victoria Securities Internasional Corporation, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing :-----

1. Nama : R. Agustinus Wisnu Widodo
Pekerjaan : Direktur Victoria Securities Indonesia
Alamat : Ontario UG 2/9 Kota Wisata, Rt. 01 / Rw. 019 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor
2. Nama : Amir Faruk
Pangkat/NIP : Muda Dharma /19840930 301012 1004
Pekerjaan : TU Pada Kejaksaan Agung RI

Telah Melakukan penyitaan berupa :-----

1. 1 (satu) lembar fotocopy Perhitungan estimasi harga tanah 1000 Ha;
2. 1 (satu) Map transparan biru, yang berisi fotocopy:
 - 1 (satu) bundel Kronologis permasalahan PT. Adyaesta Ciptatama.
 - 2 (dua) lembar Resume pemeriksaan Sdr. Handi Cahyadi (ayung) atau HC Tanggal 21 April 2015.
3. 1 (satu) Map transparan biru, yang berisi fotocopy:
 - 1 (satu) bundel Notulen Rapat di Biro Hukum Departemen Keuangan Tgl. 13 Januari 2014;
 - 1 (satu) buah fotocopy Surat Kantor Hukum Muchtar Arifin & Partners Nomor: 003/KHMA/I/2014 Tgl. 14 Desember 2014 kepada Sekretaris Jenderal Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RI.

1998. Dimana negara melalui BPPN banyak memberikan diskon pada aset obligor yang berhutang kepada bank yang menjadi pasien BPPN.

Dalam penelusuran dokumen yang dilakukan Majalah AKTUAL diketahui kronologis pembelian aset berupa tanah seluas 1.200 hektar di Karawang, Jawa Barat. Bermula dari hutang PT Adyaesta Ciptatama anak perusahaan Adyaesta Group (AG) pada Bank Tabungan Negara (BTN) pada September 1995. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk proyek perumahan Karawang I dan II.

Namun pada perjalanannya proyek tersebut terhenti lantaran krisis ekonomi. BTN menjadi salah satu bank yang masuk sebagai pasien BPPN. Pada tahun 2002 BPPN menggelar lelang hak tagih atas hutang AG sebesar Rp266.400.195.000. Lelang tersebut diikuti oleh tiga pihak yakni PT First Capital, Harita Kencana Securities dan VSIC. Lelang tersebut dimenangkan oleh PT First Capital dengan penawaran Rp69,5 miliar.

Setelah memenangkan lelang PT First Capital membatalkan pembelian. Alasannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGU) No 1/Karanganyar seluas 300 hektar yang dijadikan jaminan hanya berupa fotocopy. Pasca pembatalan pembelian tersebut VSIC kembali melakukan penawaran tanggal 20 Agustus 2003.

Melalui surat notifikasi BPPN Nomor Prog-7207/BPPN/0903, tanggal 1 September 2003 VSIC diumumkan sebagai pemenang. Sepekan setelah diumumkan pihak VSIC langsung membayar kewajiban jual-beli dengan obyek hak tagih terhadap AG dengan nilai Rp32 miliar. Perjanjian tersebut ditandatangani dalam Perjanjian Pengalihan Piutang No 57 di depan notaris Eliwaty Tjitra SH tanggal 17 November 2003.

Pembelian aset inilah yang kemudian dijadikan dasar Kejaksaan Agung melakukan penyidikan. Rendahnya nilai jual pengalihan piutang dinilai merugikan negara oleh Kejaksaan Agung. Penyidikan ini sendiri berjalan setelah kuasa hukum AG Jonson Panjaitan melaporkan



kasus ini ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2012.

PT Adyaesta berniat melunasi seluruh utangnya yang sekarang cessionnya dipegang VSIC. PT Adyaesta menawarkan angka Rp 300 miliar. Namun, penawaran ini ditolak VSIC. Lalu, PT Adyaesta mengirim surat somasi ke VSIC. Isinya, PT Adyaesta ingin mengetahui rincian utang yang harus dibayarnya. Somasi ini dibalas VSIC dengan menjawab, kewajiban utang PT Adyaesta adalah Rp 1,8 triliun. Surat VSIC ditindaklanjuti PT Adyaesta dengan mengatakn angka Rp 1,8 triliun terlalu tinggi. Selama Juli – Agustus 2013, terjadi beberapa kali surat menyurat antara PT Adyaesta dengan VSIC terkait nilai utang yang harus dibayar. Puncaknya, pada Agustus 2013, VSIC menyodorkan angka Rp 2,04 triliun jika PT Adyaesta ingin melunasi utangnya.

Kejaksaan menilai selisih harga yang diajukan oleh PT First Capital sebesar Rp69 miliar dibandingkan harga yang dimenangkan VSIC pasca pembatalan pembelian PT First Capital sebesar Rp32 miliar adalah tindakan korupsi.

Menurut kuasa hukum VSIC, Irfan Aghasar dugaan korupsi yang ditudingkan kepada kliennya terkesan mengada-ada. Penurunan harga yang terjadi jelas terjadi pasalnya PT First Capital membatalkan

pembelian lantaran adanya cacat dokumen dalam aset tanah sebesar 300 hektar. “Terus kerugian Negara apa yang ditimbulkan berdasarkan cession yang sudah kami beli,” katanya. Diungkapkan Irfan, VSIC mengetahui informasi adanya lelang dari situs resmi BPPN. Lalu, VSIC tertarik mengikuti lelang penjualan cession PT Adyaesta pada pelaksanaan lelang ke-4 yang berlangsung Agustus 2003. Di lelang ini, VSIC menjadi pemenang. “Kita hanya peserta dan mengajukan penawaran di titik tertinggi. Dan secara hukum itu dimenangkan,” urai Irfan.

Belakangan VSIC melaporkan dugaan pemalsuan dokumen tanah 300 hektar tersebut kepada Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso membenerkan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut. Bahkan tidak lama lagi akan menetapkan tersangka. Direktur Utama PT Adyaesta Ciptatama terlapor dalam kasus ini Johnny Wijaya. “Pemalsuannya kita tersangkakan, karena (kasus ini) sudah naik ke penyidikan,” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Untuk itu, lanjut Budi, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen dari pihak terkait serta meminta keterangan dari para saksi. “Tapi belum bisa dibuktikan

tentang pemalsuannya karena barang bukti untuk pembanding (dari Badan Pertanahan Nasional) nya belum," ujarnya.

Terkait dengan rendahnya nilai jual aset yang dikuasai BPPN berdasarkan penelusuran Aktual, BPPN kala itu memang memberikan diskon besar-besaran kepada siapa saja yang mau membeli aset dari obligor bermasalah.

Setidaknya ada sekitar 3.000-4.000 dengan status lengkap data kepemilikannya. Aset bermasalah itu diperkirakan berjumlah 2.400-3.400 aset. Total nilai aset saat ini mencapai ratusan triliun. Kondisi inilah yang membuat pasar tidak merespon positif lelang yang dilakukan BPPN. Sampai akhirnya munculan ide untuk memberikan diskon.

Panangian Simanungkalit, konsultan BPPN dalam Program Penjualan Aset Properti (PPAP) sempat mengatakan inovasi diskon dilakukan karena memang minimnya peminat jika aset dijual sesuai harga pasar. Diskon itulah kemudian yang akan digunakan oleh pembeli untuk mengurus surat dan akta aset yang bermasalah.

Panangian mencontohkan, bangunan yang jika surat-suratnya lengkap berharga Rp100 juta, ditawarkan dengan harga Rp30 juta. "Diskon tujuh puluh juta tersebut untuk menutup biaya pembuatan surat-surat. Asalkan harga cocok, tidak ada aset properti yang tidak laku," ujar Panangian pada tahun 2003 silam kepada sejumlah media.

Melihat rumitnya kasus yang sedang dialami oleh Kejaksaan Agung, Fadli Zon berharap kops Adiyaksa berhati-hati. Pasalnya bukan hanya pembelian aset milik VSIC saja yang harus dibongkar. Akan banyak aset dengan nilai triliunan rupiah yang dijual dengan mekanisme yang sama. Celaknya set tersebut saat ini telah dimiliki oleh orang-orang yang menopang ekonomi nasional.

Ia khawatir jika penyidikan ini akan membawa Indonesia kepada pusaran krisis seperti tahun 1998. "Dalam kondisi ini bisa efek penularan, 1998

juga ada efek begini, membuat orang berpikir ulang investasi di sini. Ini juga kan kasus puluhan tahun diangkat lagi," imbuhnya.

Meski tak mau menyatakan bahwa pihak berwajib perlu memanggil Megawati yang diduga terlibat, Fadli mengatakan bahwa pengusutan harus dilakukan terhadap semua kasus masa lalu yang merugikan negara. "Itu saya sampaikan. Itu di zaman Bu Mega, banyak aset dijual dengan murah karena krisis. Kalau mau usut, jangan satu, usut semua. (Termasuk BLBI?) Buka saja semua," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sementara itu Jaksa Agung menegaskan langkah yang diambil oleh tim penyidik sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurutny saat ini Kejaksaan tengah meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan audit. "Kita sudah minta opini dari pihak-pihak yang memang diberikan kewenangan audit," ujar Prasetyo.

Kilas Balik

Kasus ini bermula dari kredit yang diajukan oleh PT Adyaesta Ciptatama, anak perusahaan dari Adyaesta Grup (AG) sebesar Rp 469 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektare sekitar akhir tahun 1990. Namun pada saat akan membangun proyek krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998. BPN juga terkena imbasnya sebagai salah satu bank yang diselamatkan BPPN.

Dengan kata lain, tutur Kasubdit Penyidikan Jampidsus Sardjono Turin, BTN masuk sebagai pasien BPPN. "Pada 2003 aset bank dilelang, termasuk utang atau kredit yang diajukan PT AG pada tahun 1990." Ujarnya.

Salah satu aset milik PT AC dibeli oleh Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC) melalui lelang yang dilakukan oleh BPPN dengan nilai Rp26 miliar. Saat itu BPPN dipimpin oleh Syafruddin Tumenggung di era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003.

VSIC sendiri tidak memiliki kaitan

dengan PT VS Indonesia. Badan hukum PT VS Indonesia berbeda dengan VSIC. PT VSIC berkedudukan di British Virgin Island. Semakin aneh jika melihat akta pendirian perusahaan PT VS Indonesia berdiri tahun 2011, bersama dengan Victoria Investama Tbk yang berdiri tahun 2013. Lantas bagaimana mungkin perusahaan ini mengikuti lelang yang dilakukan tahun 2003.

Permasalahan muncul setelah PT AU menginginkan membeli aset tersebut kembali melalui VSI. Sebagai pemilik aset PT VSI memasang harga Rp2,1 triliun. Hal itulah yang membuat PT AG melapor ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2012. Pelapornya adalah direktur PT AU Jhonny Wijaya.

Namun kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung setelah hampir 7 tahun tidak ditindaklanjuti oleh Kejati DKI Jakarta. Meskipun sudah melakukan pengeledahan dan pemeriksaan serta penyitaan hingga saat ini jaksa belum bisa menghitung kerugian yang diderita oleh negara. Sampai saat ini sudah 10 saksi yang diperiksa oleh penyidik.

Anehnya atas dasar laporan inilah Kejaksaan Agung menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembelian aset yang dilakukan oleh VSIC. Yangki Halim Direktur PT VS Indonesia menilai banyak keganjilan dalam kasus ini. Salah satunya yakni terkait dengan pemeriksaan Direktur dan Komisaris PT VS Indonesia Aldo dan Suzan, di kantornya, Jumat (14/9).

Menurutnya Suzan dan Aldo tidak berstatus tersangka dan belum pernah diperiksa dengan status tersangka. "Ada upaya pemutarbalikan fakta tidak obyektif dan sangat jauh dari asa prudent," ujarnya, Senin (17/8).

Disisi lain Sarjono menengarai ada keterlibatan oknum BPPN yang terlibat dalam perkara ini. Siapakah oknum BPPN tersebut. Meskipun badan bentukan negara tersebut telah bubar, tentu tidak sulit bagi Kejaksaan Agung menemukan oknum BPPN tersebut jika memang terbukti salah. Wahyu Romadhoni-Nebby Habiburrahman

Saling Bantah di Korps Adhyaksa

Kali ini ada yang aneh di Kejagung. Ada tiga orang petinggi Korps Adhyaksa saling bantah di kasus pembelian hak tagih (cessie) Bank BTN pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Atau sering disebut media sebagai Kasus Victoria.

Beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung menaikkan status kasus itu ke level penyidikan, tanpa satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (kini Kejati Yogyakarta), Tony Tribagus

Spontana, hingga 1 September 2015 lalu, memastikan bahwa Kejagung belum pernah menetapkan tersangka dalam kasus ini. "Penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyak nya," katanya.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh Aktual, ada fakta hukum juga yang menyatakan bahwa Kejagung telah menetapkan mantan Direktur PT Victoria Sekuritas, Lies Lilia Jamin sebagai tersangka.

Di dalam sebuah surat yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen, Armingsyah pada 14 Agustus

2015, tertulis dengan jelas seperti ini: "Dalam rangka mendukung operasi Yustisi pada tahap penyidikan/ penuntutan/eksekusi dipandang perlu untuk melakukan tindakan pencegahan keberangkatan ke luar negeri terhadap tersangka tersebut pada halaman dua (di halaman dua tertulis nama Lies.red)".

Inti dari surat sebanyak dua halaman itu adalah permintaan larangan berpergian ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi untuk mantan Direktur PT Victoria Sekuritas, Lies Lilia Jamin selama enam bulan. Surat

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 183 /D/Dsp.3/08/2015.
TENTANG
PENCEGAHAN DALAM PERKARA PIDANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Nota Dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : R-169/F/ Fd.1/07/2015 tanggal 05 Agustus 2015.
- Menimbang : a. Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa dalam Pasal 91 dan 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Jaksa Agung mempunyai wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penangkalan.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung operasi Yustisi pada tahap penyidikan / Penuntutan / Eksekusi dipandang perlu untuk melakukan tindakan pencegahan keberangkatan keluar negeri terhadap tersangka tersebut pada halaman dua, dengan menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/ A/J.A/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-021/A/ J.A/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan.
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/J.A/8/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pencegahan dalam perkara pidana.

PERTAMA : Mencegah keluar wilayah Indonesia terhadap seseorang dengan sebagai berikut :

Nama lengkap : LIES LILIA JAMIN;
Tempat lahir : Semarang;
Umur, tanggal lahir : 46 tahun, 29 Januari 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Wijaya Timur I No.10 Kebayoran B Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Phillip Indonesia (Mantan Direktur PT. Victoria Sekuritas, Tahun 2003-2005);
Pendidikan : S.2.

karena dugaan tindak pidana korupsi rekayasa dalam penjualan Tig / Cessie PT. Adyaesta Ciptatama, PT. Sentraloka Adyabuana dan PT. Surya Cemerlang) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2003 kepada Victoria Securities International Corporation, sebagai tersangka dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 14 Agustus 2015

A.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA INTELIGENSI

ARMINSYAH

itu dengan tegas juga menyatakan Lies disangkutkan telah melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001, juntho pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada penjelasan UU tersebut di pasal 2 ayat (1) tertulis bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah)"

Sementara Pasal 3 tertulis "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"

Aktual telah mengonfirmasi Ditjen Imigrasi soal ini. Dan Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Heroni membenarkan hal itu. "Sudah dicegah oleh Kejagung berdasarkan keputusan

Jaksa Agung RI No KEP-183/D/Dsp.3/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 berlaku 6 bulan," katanya, Jumat (4/9).

Yang membuat tanda tanya besar adalah pernyataan Jaksa Agung, HM Prasetyo yang ternyata membantah penetapan Lies Lilia Jamin sebagai tersangka. Jaksa Agung yang juga politisi Partai Nasdem tersebut, kembali menegaskan bahwa Kejagung posisinya masih dalam proses mencari bukti. "(Kasus Victoria) masih jalan terus. (Belum ada penetapan tersangka) tapi arahnya ke sana," ujarnya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (4/9).

Yang membuat kasus ini menjadi tambah aneh lagi adalah pernyataan Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung, Sarjono Turin. Mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut bahkan menyatakan bahwa Kejagung belum menetapkan Lies Lilia Jamin sebagai tersangka dan belum mencekal siapapun untuk berpergian ke luar negeri di kasus ini. "Enggak ada, cekal itu harus menyebut identitas, diduga terlibat saja," ujar Turin, di Kejagung, Jakarta, Jumat (4/9).

Ia mengatakan, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti serta ahli, untuk menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab. "Itukan kita sangat hati-hati sekali menyikapi itu, sebagaimana disampaikan RI (Presiden) kita tak harus gaduh, tidak boleh mengekspos secara vulgar, sebelum menjadikan orang itu tersangka, hati-hati. Penyidikan tetap jalan," kata Turin.

Sementara itu, kuasa hukum mantan Direktur PT Victoria Sekuritas, Lies Lilia Jamin, Primaditya Wirasandi, mengaku bingung dengan carut-marut koordinasi di internal Kejaksaan itu. Ia merasa, Kejagung mempermainkan kliennya. Sebab dalam surat panggilan maupun dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung, status kliennya tertulis sebagai saksi. "Kami tidak tahu dasarnya apa klien kami dinyatakan tersangka dalam surat cekal tersebut," kata dia beberapa saat lalu.

Lantas atas dasar apa Jamintel

Arminsyah menuliskan status tersangka dalam surat cekal Lies Lilia Jamin? Sementara Jaksa Agung menyatakan bahwa pihaknya masih mencari bukti untuk menetapkan tersangka.

Surat tersebut menjadi rentetan pertanyaan yang mesti dijawab Kejaksaan Agung, setelah sebelumnya juga ditemui adanya perbedaan dalam surat penggeledahan kantor Victoria Securities Indonesia pada 12 Agustus 2015.

Menurut aktivis anti korupsi, Ferdinand Hutahaean sikap beda pendapat yang ditunjukkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Arminsyah patut dipertanyakan. "Ini benar-benar aneh, mestinya hal tersebut tidak boleh terjadi. Ini bukan masalah koordinasi tapi ini ada permainan disini," ujar dia.

Gaduh Penegakan Hukum, Berpihak ke Siapa?

Melihat Kasus Victoria melindungi kemana-mana, Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan menginstruksikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan jangan sampai membuat instabilitas perekonomian negara.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon sempat mengklasifikasikan tindakan Kejagung di kasus ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Seperti sangkaan penegakan hukum yang dilakukan Komjen Pol Budi Waseso ketika mengacak-acak Pelindo II. Namun bedanya, Budi Waseso langsung diberhentikan dari posisinya sebagai Kabareskrim Polri, sementara HM Prasetyo masih duduk sebagai Jaksa Agung. "Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," kata dia.

Menurut Fadli, tindakan Kejagung menggeledah PT VSI, dapat dipandang mengganggu ekonomi. Bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. "Di sini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan jika sampai pencopotan jadi dilakukan," kata dia. *Nebby Habiburrahman*

Surat larangan bepergian keluar negeri yang dikeluarkan Kejagung untuk Lies Lilia Jamin.

Rizal Ramli Sowan ke Rumah Megawati, Bahas Revisi Proyek PLN?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menemui Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jl Teuku Umar 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/9) sore. Rizal datang sekitar pukul 16.00 Wib menggunakan mobil dinas, Toyota Crown Royal Saloon hitam berpelat RI 18.

Belum diketahui materi pembicaraan keduanya. Hingga kini, pertemuan tengah berlangsung. Rizal Ramli sebelumnya mempertanyakan target mega proyek listrik pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebesar 35.000 megawatt. Dalam rapat terakhir di kantornya, Rizal bahkan memutuskan memotong proyek tersebut menjadi 16.000 MW.

Jauh sebelum itu, saat diangkat sebagai Menko Maritim, Rizal



sudah menunjukkan sikap kritisnya. Dari rencana pembelian pesawat yang mengusik Menteri BUMN Rini Soemarno hingga target pembangunan listrik.

‘Jurus Rajawali Ngepret’, demikian ia menyebutnya. Rizal senantiasa kritis meski program yang disampaikan bersinggungan dengan ambisi Wakil Presiden Jusuf Kalla. /Wahyu Romadhoni



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menjaga marwah Trisakti pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Mega berpesan demikian setelah menggelar pertemuan dengan Rizal di kediamannya, Jl Teuku Umar 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.

“Bicara banyak hal, (Mega) titip sama saya, perjuangan Trisakti dilanjutkan. Saya katakan, saya

Ini Pesan Megawati Kepada Rizal Ramli

paham betul bahwa Indonesia perlu berubah, banyak kepentingan *status quo* yang mau Indonesia berubah,” terang Rizal usai pertemuan.

Status quo pada pemerintahan ini, lanjut dia, sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Salah satunya ada kepentingan KKN di dalamnya. Untuk menjalankan marwah Trisakti sebagaimana pesan Mega, Rizal mengaku siap mengambil resiko apapun, termasuk kemungkinan resiko terburuk.

“Kami katakan, apapun yang terjadi kami siap ambil resiko, itu bagian dari perjuangan ke level lebih tinggi. Budaya kalau bisa dibuat sulit kenapa dibuat mudah (perlu) revolusi mental,” tegasnya.

Marwah Trisakti disampaikan Rizal, menirukan ucapan Mega, merupakan ajaran Bung Karno untuk Indonesia yang berkemajuan. Dan, sampai sekarang meski menjadi visi dan misi Presiden Jokowi belum maksimal dilaksanakan. /Wahyu Romadhoni

8 Orang Lolos Seleksi Calon Pimpinan KPK

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memilih delapan nama dan diserahkan ke Presiden Jokowi di Istana. Ini dia delapan nama mereka.

“Yang ini sudah diseleksi. Delapan capim KPK ini dibagi jadi 4, berkaitan pencegahan, penindakan manajemen dan supervisi koordinasi monitoring. Sehingga ke depan ada kombinasi dari itu,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

1. Saut Situmorang dari BIN
2. Surya Tjandra seorang advokat publik
3. Alexander Marwata dari Hakim Ad Hoc Tipikor
4. Brigjen Pol Basaria Panjaitan dari kepolisian
5. Agus Raharjo yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Sujanarko, Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK
7. Johan Budi SP, Plt Pimpinan KPK
8. Laode M Syarif, Lektor FH Unhas

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengapresiasi upaya panitia seleksi calon pimpinan KPK yang telah bekerja keras dalam menyeleksi calon pimpinan KPK. “Mantap, bos. Oke punya. Kita mesti acungi jempol. Delapan nama itu mantap,” kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Ruhut mengatakan, berdasarkan pengalamannya di Komisi III mengikuti proses pergantian pimpinan KPK dari jilid I sampai jilid IV, delapan capim saat ini adalah yang terbaik. Ruhut beralasan, mereka memiliki rekam jejak yang teruji dan jauh dari unsur berbau kepentingan politik. “Salut kepada Pansel Sriikandi,” puji Anggota Fraksi Partai Demokrat ini. /Wisnu

Capim KPK Tersangka

Bareskrim Polri sudah menetapkan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation, Nina Nurlina Pramono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penanaman 100 ribu pohon menggunakan anggaran CSR. Nina adalah salah satu Calon Pimpinan KPK yang dicoret oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso menegaskan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).

“SPDP sudah keluar. Sudah tersangka (Nina),” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Terkait pemeriksaan Nina sebagai



tersangka, kata dia, selanjutnya akan dijadwalkan oleh penyidik. Meski begitu, jenderal bintang tiga yang akrab disapa Buwas itu mengaku tak belum tahu kapan Nina akan digarap penyidik. “Pemeriksaan tergantung penyidik, nanti ditentukan jadwalnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Victor Edi Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah dokumen mengenai relawan fiktif dan penyunatan harga pada CSR

penanaman pohon oleh Pertamina Foundation.

“Kita sudah memperoleh beberapa barang atau dokumen yang menyangkut Pertamina Foundation. Nah, di sana ada yang perlu harus kita klarifikasi, bahwa ada laporan kepada kita, relawan-relawan untuk menanam pohon itu ada yang fiktif,” kata Victor di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (2/9) kemarin.

Ia menjelaskan, klarifikasi akan dilakukan melalui pengecekan tanda tangan, alamat si relawan hingga pembayaran.

“Kita cek tanda tangannya, kemudian melalui pembayarannya dan juga tanda tangan pada pembayaran kalau itu diterima pakai kwitansi. Kalau itu ditransfer, kita akan cek rekeningnya siapa yang membuat rekening tersebut,” ujarnya. /Wisnu

Dua Aliansi Pemuda Tuntut Jaksa Agung Ungkap Peran Laksamana Sukardi di Kasus Cessie

Dua kelompok demonstran yang mengatasnamakan dirinya Pemuda Restorasi Anti Korupsi Jakarta (PERAK) dan Aliansi Pemuda Penyelamat Aset Negara geruduk gedung Kejaksaan Agung, Rabu (2/9).

Keduanya kelompok demonstran tersebut menuntut Kejagung agar berani mengusut dugaan korupsi pada penjualan aset-aset yang pernah dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Berdasarkan pantauan Aktual, aksi unjukrasa PERAK mulai berlangsung di halaman depan Kompleks Kejaksaan sejak pukul 11.00 WIB kemudian disusul kelompok APPAN yang datang sekitar pukul 11.30 WIB.

Para demonstran dari dua kelompok berbeda menyuarakan tuntutan mereka yang sama kepada Kejagung, untuk mengusut para konglomerat dan sejumlah elit partai yang diduga melakukan penyimpangan dalam pembelian aset negara.

“Kami mendesak Kejagung untuk



memeriksa dan mengadili Kepala BPPN 2002-2004 dan Menteri BUMN saat itu,” ujar Koordinator aksi dari Pemuda Restorasi Anti Korupsi (PERAK) Aditya Iskandar di halaman depan Kejagung.

Sedangkan demonstran lain dari Aliansi Pemuda Penyelamat Aset Negara, juga memiliki tuntutan dengan meminta Kejagung untuk tidak berhenti mengusut perkara penjualan cessie (jaminan hak tagih) oleh BPPN kepada Victoria Securities International Corporate (VSIC) semata.

“Kami minta Kejagung buka kembali seluruh perampokan aset

BPPN yang merugikan negara,” teriak orator aksi Martin Darlian.

Para demonstran terlihat membawa beberapa alat peraga berupa topeng wajah mantan Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Mereka juga memamerkan tuntutan mereka pada karton dan spanduk besar yang turut dibawa ke depan Kejagung.

Demonstrasi oleh dua kelompok demonstran terlihat berjalan aman. Puluhan aparat kepolisian terpantau turut mengamankan jalannya aksi di halaman depan Kejagung itu. /Nebby

Resep untuk Menggairahkan Lagi Ekonomi

Di tengah melesunya ekonomi, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan lagi kehidupan ekonomi. Salah satunya adalah dengan insentif di bidang investasi bisnis, perpajakan, dan deregulasi di sektor-sektor kunci manufaktur.

Kondisi ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan yang melemah saat ini, penurunan nilai rupiah, dengan dampak melesunya dunia usaha serta terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), menuntut pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah penyelamatan. Langkah-langkah itu tentunya bukan sembarangan dan asal cepat saja, tetapi harus dipertimbangkan secara matang dan cermat, untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk itu, perspektif pandangannya terhadap masalah ini harus disepakati lebih dulu. Pemerintah Pro-Bisnis adalah pemerintah Pro-Rakyat, manakala pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai hasil yang cepat sekarang, adalah penting bahwa Pemerintah Indonesia menginspirasi rasa kepercayaan, dengan menggeser fokusnya pada ekonomi dan tugas mendorong investasi bisnis.

Fokus dini Pemerintah pada infrastruktur—khususnya dalam bidang energi dan transportasi—akan memberi layanan yang baik bagi negeri ini di masa depan. Namun, sayangnya penuntasan proyek-proyek penting semacam itu butuh waktu. Bahaya stagflasi—inflasi yang tinggi dan rendahnya atau tidak adanya pertumbuhan—saat ini haruslah dihindarkan.

Secara historis, pemberi kontribusi besar bagi periode-periode

pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan di Indonesia selama ini adalah investasi dari kalangan bisnis. Periode-periode pertumbuhan semacam itu telah mengangkat nasib jutaan rakyat Indonesia, hingga keluar dari kemiskinan. Belanja pemerintah di Indonesia sayangnya jarang menjadi pendorong pertumbuhan yang utama, dan hanya memberi kontribusi 9 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) selama 5 tahun terakhir. Ini berarti kurang dari sepertiga dari apa yang telah disumbangkan oleh investasi kalangan bisnis.

Insentif-insentif yang Menggiurkan

Presiden, Kantor Presiden, dan Kementerian-kementerian Pemerintah dan kantor-kantor mereka harus menyebarkan mantra pertumbuhan pro-ekonomi, yang menyarankan pembelanjaan investasi dan bisnis. Hal ini akan memenuhi tuntutan permintaan yang sudah ada dan mengarahkan atau mendorong ekonomi ke arah yang diharapkan secara paling efisien dan efektif. Aturan-aturan yang menyediakan insentif-insentif yang menggiurkan untuk berinvestasi harus seketika dikeluarkan, serta disosialisasikan dan dipromosikan besar-besaran.

Insentif-insentif itu harus dalam bentuk ketentuan pajak yang disukai, serta deregulasi yang ditujukan ke sektor-sektor kunci manufaktur. Khususnya, manufaktur yang bersifat padat karya dan memiliki potensi ekspor. Juga, pada sektor jasa, khususnya jasa di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan yang juga penting, pada sektor-sektor dengan efek pelipatan atau berantai yang tinggi pada ekonomi, seperti pada sektor properti dan retail.

Sementara ada dorongan



sejak dini untuk meningkatkan pendapatan pajak guna mendukung pembelanjaan Pemerintah, bukti-bukti empiris secara global tidak mendukung anggapan bahwa peningkatan rasio pajak terhadap PDB akan meningkatkan kemakmuran. Pergeseran fokus ini ke lingkungan pajak yang disukai bagi investasi tentulah akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi bangsa.

Dari uraian umum di atas, ada beberapa catatan tambahan. Titik krusial bagi pemerintah Indonesia sekarang adalah fokus pada ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemulihan pertumbuhan ekonomi adalah kebutuhan mutlak sekarang, karena selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, ia juga memberi ruang bagi penanganan isu-isu nasional—seperti pemberantasan korupsi dan keadilan—pada waktu yang tepat.

Mengurangi Warga Miskin

Jika kita melihat data statistik dari 1976 hingga 2010, jelas bahwa pengurangan terbesar atas jumlah populasi yang hidup dalam



Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/9).

kemiskinan terjadi pada periode-periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Percepatan pertumbuhan jelas akan mendorong standar kehidupan warga Indonesia ke tingkatan yang lebih sejahtera.

Prakarsa-prakarsa infrastruktur dari Pemerintah juga akan memberi manfaat bagi Indonesia menuju masa depan. Masalahnya, proyek-proyek infrastruktur itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dituntaskan. Sedangkan, pembelanjaan Pemerintah semata-mata tampaknya juga tidak akan cukup untuk meningkatkan pertumbuhan, karena kontribusinya terhadap PDB hanya sepertiga dari sektor swasta. Maka penciptaan sinergi dengan kalangan bisnis swasta sekarang dan secara segera, untuk membantu pembangunan negeri ini, adalah solusi yang sama-sama menguntungkan pemerintah dan swasta (*win-win solution*).

Bahaya stagflasi juga harus dihindarkan sedapat mungkin. Jika kondisi ekonomi lesu yang ada sekarang terus berlangsung,

bahayanya sangat nyata. Ia menghadirkan risiko besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Periode-periode stagflasi di negara-negara lain secara global telah menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperlambat penciptaan kesejahteraan rakyat.

Cara untuk menangani stagflasi adalah dengan berusaha mencapai dan memelihara suatu keseimbangan antara permintaan dan penawaran (*supply-demand equilibrium*) dan adanya pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan. Untuk mencapai itu, diterapkan strategi yang spesifik dan efektif terhadap sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan (*demand*), Pemerintah sekarang telah menunjukkan perhatian dan inisiatif yang baik.

Penawaran yang dioptimalkan dapat dicapai dengan memberikan insentif yang sangat menarik, termasuk *tax holiday* dan deregulasi. Deregulasi ini, misalnya, mengurangi birokrasi dalam hal perizinan, serta memberi lebih banyak kebebasan di pasar dalam menentukan bagaimana

memperoleh pembiayaan.

Perlu Kebijakan yang Jelas

Juga, perlu ada kebijakan yang jelas bagi repatriasi dana-dana di luar (offshore funds) untuk dikelola secara transparan dari Indonesia (untuk tidak dibatasi dalam hal di mana dana-dana itu dapat diinvestasikan secara global). Kebijakan pemerintah yang mempromosikan investasi dan iklim usaha yang ramah secara alamiah akan mendorong permintaan. Semua ini pada gilirannya memungkinkan bisnis untuk menciptakan kapasitas industrial tambahan dan meningkatkan efisiensi.

Tindakan-tindakan sisi penawaran harus dikerahkan ke arah insentif-insentif yang menggairkan, yang mendorong kalangan bisnis untuk berinvestasi. Pertimbangkan de-regulasi atas sektor-sektor ekonomi baru atau re-regulasi sektor-sektor ekonomi, guna mendorong investasi.

Setiap regulasi baru oleh kementerian-kementerian pemerintah harus secara tegas mendorong pertumbuhan dan investasi. Jika tidak begitu pasti bahwa sebuah regulasi akan mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka regulasi itu jangan ditetapkan menjadi undang-undang.

Industri-industri kunci untuk mendukung –dengan insentif-insentif semacam itu—idealnya adalah dalam sektor manufaktur yang memiliki potensi ekspor atau substitusi impor. Juga, sektor jasa-jasa domestik yang bersifat kritis dalam menggerakkan pertumbuhan, serta sektor yang memiliki dampak pelipatan tinggi pada ekonomi. Tiga langkah kebijakan ini akan menangani tiga tantangan kunci, yaitu: pertumbuhan, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan dalam mata uang asing.

Intervensi pemerintah (dan tambahan regulasi) tampaknya tidak akan mendorong pertumbuhan dalam tingkatan dan jangka waktu yang diharapkan. Sebaliknya, pengalaman global mengisyaratkan bahwa periode-periode deregulasi oleh pemerintah justru yang akan mendorong investasi dan pertumbuhan. • Satrio Arismunandar



OJK Permudah WNA Buka Rekening di Dalam Negeri

Berawal dari besarnya potensi turis yang datang ke Indonesia, baik untuk kunjungan wisata maupun perjalanan bisnis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk membuat kebijakan terkait kemudahan bagi warga negara asing yang ingin membuka rekening atau *time deposit* dalam bentuk valuta asing (valas).

Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad, mengungkapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong

masuknya turis dan investasi asing serta membantu likuiditas dolar di Indonesia tersebut sudah dalam tahap finalisasi. “Kebijakan ini sedang dalam tahap finalisasi, segera dalam waktu dekat kami akan meluncurkan surat edarannya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta baru-baru ini.

Langkah yang diambil OJK ini, kata Muliawan, diharapkan mampu memobilisasi sumber dana valas karena warga asing yang berkunjung di Indonesia cukup besar.

“Dalam setahun jumlah turis

asing di Indonesia antara 10-12 juta, dan turis asing macam-macam tipenya. Ada yang sekali seumur hidup ke Indonesia dan ada yang berkali-kali dalam satu tahun, ini banyak kira-kira jumlahnya ada sekitar 20 persen dari total turis yang datang,” ujar Muliawan Hadad di Jakarta, Selasa (8/9).

Asumsinya, kata dia, jika 20 persen dari jumlah turis asing itu menabung di Indonesia, maka ada potensi penambahan nasabah sebanyak 2,4 juta rekening atau potensi penambahan valas mencapai 24 miliar dolar AS.

“WNA yang memiliki nilai tabungan di bawah 50 ribu dolar AS persyaratan yang dikenakan hanya paspor, sedangkan untuk

Wisatawan asing menikmati pemandangan gugusan Bima Sakti atau Milky Way yang terlihat membujur di langit selatan pulau Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8).

asing yang taruh duit di kita lebih banyak, rencananya kan begitu. Itu lebih bagus kalau dipermudah,” ujar Budi di sela-sela aktivasi produk Simpanan Pelajar (SimPel) oleh OJK di Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Budi, warga asing yang bekerja di Indonesia juga cukup banyak dan membutuhkan layanan perbankan lokal. Gaji mereka dinilai relati besar dan dapat menjadi potensi simpanan tersendiri bagi bank-bank di Indonesia.

“Lebih banyak orang asing yang gajinya besar menabung di lokal, apalagi kalau dolar, jadi bagus. Uang yang kita butuhkan untuk bangun infrastruktur itu kurang kan, ini perlu ditingkatkan,” kata Budi.

Ia mengatakan, uang yang beredar di Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp4.200 triliun, sementara yang sudah dipakai untuk kredit sebanyak Rp3.800 triliun. Sisanya sekitar Rp400 triliun dalam bentuk simpanan dinilai masih relatif kurang atau terjadi *saving investment gap*.

“Listrik aja butuh dana Rp700-Rp800 triliun, nah itu yang diperbanyak. Dengan cara begini, *income* orang-orang asing di sini masuk ke bank,” kata Budi.

Budi menambahkan, *saving investment gap* yang cukup besar dinilai juga berkontribusi terhadap tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena Indonesia

memang butuh banyak uang untuk biaya

pembangunan.

“Untuk itu perlu ditingkatkan *saving*-nya penduduk Indonesia. Sekarang yang punya rekening baru 60 juta, ya cuma itu saja yang bisa nabung, itu aja yang bisa dikumpulkan. Nah, itu tidak cukup kuat buat bangun infrastruktur yang dibutuhkan, akibatnya kalau kurang pinjam dari luar tapi ada pressure-nya. Itu kenapa Pak Muliaman lakukan ini, supaya lebih banyak dana yang berasal dari lokal,” ujar Budi.

Tak hanya Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi G Sadikin, Senior Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Muhammad Ali pun mengapresiasi rencana kebijakan OJK kali ini.

Muhammad Ali menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran warga negara asing (WNA) membuka rekening di bank dalam negeri akan mendukung pariwisata Indonesia.

“Dengan BRI punya unit kerja hampir di seluruh Indonesia, kelonggaran itu untuk mendukung pariwisata yang ada di daerah, tentunya kami lebih memungkinkan kalau mereka jalan-jalan,” tutur dia di Jakarta, Selasa (8/9).

Muhammad menuturkan sebagian besar tempat pariwisata berada di daerah sehingga segmen BRI yang menyentuh daerah akan mempermudah menjangkau WNA yang berada di daerah-daerah pariwisata. Apalagi, tutur dia, BRI telah menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk mempermudah WNA melakukan transaksi keuangan.

Selain itu, ia menuturkan akan memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menambah *Current Account Saving Account* (CASA) BRI. Sedangkan strategi BRI dalam menyikapi kebijakan tersebut adalah melalui tahapan mitigasi risiko.

“Tentunya juga dengan kebijakan tersebut kami ambil dan tangkap dengan baik, kami akan memanfaatkan untuk bisa menambah CASA dengan sekarang diperlonggar syarat-syaratnya itu,” tutur dia. ◻ Ismed Eka Kusuma

nilai tabungan lebih dari 50 ribu dolar AS akan diberikan persyaratan tambahan,” jelas Hadad.

Rencana OJK merelaksasi aturan layanan perbankan lokal untuk WNA ini disambut baik oleh beberapa pihak.

Adalah Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi G Sadikin yang menanggapi positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memberikan kelonggaran bagi warga negara asing atau WNA membuka rekening di bank dalam negeri.

“Menurut saya bagus sih, biar orang



Muliaman D. Hadad

Utang ADB dan World Bank untuk Infrastruktur

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan pemerintah akan berutang pada Asian Development Bank (ADB) dan World Bank. Pinjaman pada kedua lembaga keuangan itu akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

“Ini sebenarnya utang-utang yang sudah komitmen lama, tapi ada unsur-unsur baru ADB untuk membantu kita lebih banyak, termasuk misalnya USD 5 miliar, dan dari World Bank juga dengan proyek-proyeknya mereka akan kasih kita USD 11 miliar,” kata Sofyan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Nantinya pinjaman itu akan masuk dalam *blue book* yang disusun Bappenas. Pinjaman tersebut juga



merupakan pinjaman jangka panjang, bisa mencapai 30 tahun. Sofyan juga memastikan bunga dari pinjaman tidak besar, hanya 1 sampai 3 persen. “Saya pikir semua bantuan pembiayaan infrastruktur diarahkan untuk diambil jangka panjang, multilateral yang cukup, dan bunganya ringan,” tutur dia.

“Bunganya rata-rata 1 sampai 3 persen (ADB), kalau World Bank 1 persen untuk 30 tahun, *gross rate* 10 tahun,” tambah Sofyan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Konferensi Asia Afrika, menyatakan anggapan persoalan ekonomi hanya dapat diselesaikan lembaga pendanaan dunia --seperti IMF, World Bank, dan ADB-- sudah usang dan perlu dibuang.

Namun, ia juga menambahkan tak ada satu pun negara di dunia yang bisa lepas dari utang, termasuk negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi seperti Tiongkok. “Tidak bisa pemerintah tanpa utang. Karena di dunia semua ada utang, Cina juga utang. Uangnya banyak tapi dia juga utang karena utang itu lebih murah daripada kita punya duit,” tegas dia.

Sofyan melihat pernyataan Jokowi dalam konferensi tersebut hanya terbawa suasana nasionalisme, tanpa memperhatikan kenyataan di lapangan. Pemerintahan saat ini yang fokus pada pembangunan memerlukan pinjaman tersebut. “Itu nuansa saat Konferensi Asia Afrika, nuansa hadapi negara Asia Afrika dengan nasionalisme lebih tinggi. Tapi secara praktis kita lihat utang, selama utang hanya jadi pelengkap, bukan jadi yang utama,” ujar Sofyan. / *Ismed Eka*



Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

persen melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (9/9).

Menurut Jokowi, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian sehingga memerlukan berbagai bentuk kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Presiden merinci paket kebijakan tahap pertama September 2015 terdiri dari tiga langkah.

“Pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha,” ujarnya.

Kedua, mempercepat proyek strategis nasional menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Ketiga adalah meningkatkan investasi di sektor properti.

Menurutnya, ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. “Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional,” kata Jokowi.

Ditambahkan Presiden

sedang dipersiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan Perpres, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, serta lima rancangan peraturan lain.

“Pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika,” kata Jokowi.

Presiden juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. “Jadi nanti akan ada paket I, Paket II, dan paket III akan secara konsisten,” kata Jokowi.

Dalam paket itu, Presiden juga mengatakan melakukan penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskripsi dalam hambatan masalah hukum. Selain itu juga pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti. / *Ismed Eka*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama pada September 2015. Presiden berharap Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 mampu memperkuat industri nasional serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah seraya mengajak semua pihak bersama-sama menghadapi tantangan pelemahan perekonomian global.

“Pemerintah hari ini meluncurkan paket kebijakan tahap pertama September 2015 yang terdiri dari tiga langkah. Paket stimulus ini diharapkan mampu memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan dan penghematan bahan bakar sebesar 70

PGN-Pelni ASDP Teken MoU Penggunaan Gas Bumi Untuk Kapal Laut

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) telah menandatangani menandatangani nota kesepakatan kerjasama penggunaan gas bumi bagi armada transportasi laut dengan pihak PT Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Peresmian kerjasama ini dilakukan di Kementerian BUMN dan ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso, Direktur Utama Pelni Elfien Goentoro, dan Direktur ASDP Danang S. Baskoro. Serta disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hendi Prio mengatakan, sebagai pengembang infrastruktur gas bumi terpenting di Indonesia, PGN senantiasa melakukan terobosan-terobosan untuk mendukung program konversi BBM ke BBG.

“Kerjasama dengan Pelni dan ASDP ini merupakan bentuk sinergi positif diantara BUMN



untuk mewujudkan program konversi BBM ke BBG. PGN berharap langkah strategis ini dapat mendorong pemanfaatan gas bumi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, khususnya di sektor kemaritiman,” kata Hendi di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/9).

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong pembangunan di bidang kemaritiman. Penggunaan bahan

bakar gas yang lebih efisien dan ramah lingkungan akan membuat ongkos transportasi laut di Indonesia lebih efisien dan bersaing.

“Saya senang dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh PGN, Pelni dan ASDP ini. Sinergi BUMN ini harus terus didorong untuk menjadikan kinerja BUMN yang lebih efisien dan bersaing,” ungkap dia.

Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya sudah dilakukan oleh PGN dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

PGN, Pelni dan ASDP bersamasama melakukan studi persiapan pengembangan infrastruktur dan teknologi terkait penggunaan bahan bakar gas bumi bagi kapal laut.

Dengan adanya kerjasama ini nantinya kapal-kapal milik Pelni, ASDP maupun kapal perintis Ditjen Hubla akan mengkonversi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi yang dalam hal ini berupa gas bumi cair atau LNG (liquefied natural gas). / Ismed Eka

52 Perusahaan AS Bakal Berpartisipasi di Proyek Listrik 35.000 Mw



Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan pada pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt melalui pembentukan kelompok kerja energi yang akan berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia mewujudkan proyek tersebut.

“Pemerintah Amerika Serikat sangat mendukung upaya Indonesia untuk mengembangkan ekonominya, yang mana salah satunya adalah melalui pembangunan pembangkit

listrik 35.000 megawatt ini,” kata Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake Jr usai menandatangani nota kesepahaman Pembentukan Kelompok Kerja Energi yang dilaksanakan di kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jakarta, Rabu (2/9).

Ia menjelaskan terdapat 52 perusahaan serta 11 agensi terbaik negeri Paman Sam tersebut, yang akan berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan dari gabungan pelaku industri listrik Indonesia-AS itu.

“Kelompok ini kemudian akan berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN untuk melihat potensi bantuan yang dapat diberikan AS kepada Indonesia,” ujar Robert Blake Jr.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menuturkan lingkup kerja sama dalam nota kesepahaman

ini mencakup bidang teknologi emisi batu bara, penggunaan energi terbarukan, dan minimalisasi penggunaan bahan bakar solar.

Selain itu, terdapat juga kesepakatan untuk pengembangan jaringan daerah terpencil secara efisien, serta penggunaan energi terbaru bidang ketenagalistrikan.

“Pembangunan pembangkit 35.000 megawatt itu bukan menjadi target lagi, namun sudah menjadi kebutuhan Indonesia. Karena proyek ini tidak ringan, kita butuh dukungan dari banyak negara yang industri listriknya sudah maju dan teruji, salah satunya AS,” kata Sudirman.

Untuk itu, kerja sama ini juga akan dijadikan wadah bagi sejumlah pelaku ketenagalistrikan kedua negara agar dapat saling berbagi pengalaman mengenai kebijakan energi, tambahanya. / Ismed Eka

Suasana kerumunan pendukung kelompok pro-demokrasi "Bersih" berkumpul di luar Dataran Merdeka sesaat sebelum tengah malam di ibukota Kuala Lumpur, Minggu (30/8).





Gerakan Reformasi Ingin Menggusur Najib

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang dituduh terlibat skandal korupsi 700 juta dollar AS, harus menghadapi tekanan yang meningkat dari gerakan reformasi. Ini masih ditambah lagi, nilai ringgit yang terpuruk dan melemahnya ekonomi.

Tiada kata "mundur" dalam mempertahankan jabatan dan kekuasaan. Demikianlah tampaknya semboyan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Padahal puluhan ribu massa dan kelompok oposisi, yang tergabung dalam gerakan reformasi Bersih 4.0, selama dua hari berturut-turut, 29-30 Agustus 2015, telah berdemonstrasi di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, menuntut mundurnya Najib.

Puluhan ribu massa itu mengenakan kaus warna kuning. Ini mengingatkan pada massa peserta *people power* di Filipina tahun 1986, yang juga mengenakan pakaian serba kuning. Gerakan prodemokrasi itu berhasil menggulingkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, yang korup, otoriter, dan telah puluhan tahun berkuasa di Filipina dengan tangan besi.

Najib dihantam dengan tuduhan korupsi berat, yakni menerima transfer dana ke rekening pribadinya senilai 700 juta dollar AS dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebelum Pemilu 2013. Aliran dana itu terungkap di tengah penyelidikan terhadap dugaan salah kelola di dalam 1MDB, yang merupakan perusahaan pengelola investasi milik negara.

Najib tetap merasa tidak bersalah meskipun mengakui menerima uang itu. Najib dan kubu pendukungnya berkilah bahwa uang yang masuk rekening itu bukan uang negara, tapi berasal dari donatur Timur Tengah yang tak disebutkan namanya.

Cadangan Valas Menurun

Dana investasi Malaysia itu dibentuk pada masa pemerintahan Najib tahun 2009, dan bertujuan

untuk mewujudkan Malaysia sebagai negara berpendapatan ekonomi tinggi. Namun kritik mengemuka, karena 1MDB sering kelebihan bayar dan mengeluarkan fee jutaan dollar AS untuk investasi Goldman Sachs.

1MDB mulai menarik perhatian pada akhir 2014, saat terlambat bayar ke kreditur dan lalu terjerat utang 11 miliar dollar AS. Najib dituding mengambil dana 700 juta dollar AS dari 1MDB. Namun, komisi antikorupsi Malaysia mengaku sudah memverifikasi bahwa dana itu adalah sumbangan dari donatur anonim asing.

Momen yang kurang menguntungkan Najib adalah ekonomi Malaysia, seperti juga ekonomi di Indonesia dan negara-negara tetangga lain, sedang mengalami perlambatan. Nilai ringgit Malaysia sempat terpuruk ke titik terendah dalam 17 tahun terakhir, dan sempat mencapai 4,2340 per dollar AS. Hal ini membuat 1MDB urung mendapat bantuan keuangan untuk merestrukturisasi utangnya, yang mencapai 3,5 miliar dollar AS.

Sebagai negara pengekspor minyak, ekonomi Malaysia juga tertekan oleh rendahnya harga minyak dunia sejak pertengahan 2014. Produk domestik bruto (PDB) juga hanya naik 4,9 persen dalam tiga bulan terakhir sampai Juni 2015, rekor terkecil sejak kuartal tiga 2013. Cadangan valas Malaysia juga turun 19 persen menjadi 94,5 miliar dollar AS.

Dalam aksi Bersih 4.0, hadir juga mantan PM Mahathir Mohamad, yang menyerukan *people power* untuk menjatuhkan rezim Najib. Satu-satunya cara menghapuskan sistem pemerintahan lama yang korup, menurut Mahathir, adalah

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berbicara kepada media saat ikut aksi protes yang diselenggarakan kelompok pro demokrasi "Bersih" di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, Minggu (30/8).

dengan melengserkan perdana menteri sekarang. "Untuk menurunkan dia, rakyat harus menunjukkan kekuatannya, menolak pemimpin korup!" tegas Mahathir.

Ingin Mereformasi Institusi

Ketua gerakan Bersih 4.0, Maria Chin Abdullah (58), menyatakan, tujuan aksi kelompok Bersih 4.0 adalah untuk mereformasi institusi dan sistem politik Malaysia. Pertama, menginginkan pemilu yang bebas dan adil, serta meminta ketulusan pemerintah. Bersih 4.0 juga menuntut jaminan hak berhimpun, memperkokoh sistem parlemen dan demokrasi, dan menyelamatkan perekonomian negara.

"Kami berharap pemerintah lebih demokratis, karena selama ini orang awam dan para ahli tak pernah dilibatkan dalam merencanakan undang-undang. Masyarakat mengetahui ada pembuatan undang-undang baru pada H-1 sebelum disahkan. Padahal kami ingin undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat Malaysia," kata Maria Chin Abdullah.

Menghadapi oposisi yang memuncak, kubu Najib langsung melakukan langkah-langkah represif. Pada 28 Agustus 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan larangan penerbitan apapun yang terkait Bersih. Larangan itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi, yang juga Wakil Perdana Menteri. Hamidi mengancam, pimpinan Bersih bisa menghadapi konsekuensi jika mereka berani melanggar hukum.

Sedangkan pimpinan partai penguasa, UMNO, yang pro-Najib mengatakan, sejuta pendukung pemerintah akan menggelar aksi tandingan pada 10 Oktober mendatang. "Ini menunjukkan solidaritas Malaysia. Najib masih

memperoleh dukungan mayoritas," ucap politisi UMNO, Jamal Yunos.

Pada bulan sebelumnya, Najib memberhentikan Wakil PM Muhyiddin Yassin, yang dianggap tidak loyal padanya. Najib juga menunjuk empat anggota parlemen yang menjadi anggota komite penyidik 1MDB sebagai anggota kabinet. Pihak berwenang Malaysia juga telah memblokir situs penyelenggara demonstrasi dan

melarang pakaian kuning dan logo kelompok, dalam usaha mencegah aksi protes itu menyebar ke kota-kota lain.

Dalam demonstrasi yang menggoyang Najib, terlihat sangat sedikit etnis Melayu yang ikut bergabung. Mayoritas demonstran adalah etnis China dan India. Mengutip data tahun 2014, etnis China di Malaysia ada 22,6 persen, etnis India 6,7 persen, dan etnis Melayu --etnis





terbesar di Malaysia-- mencapai 50,1 persen dari total penduduk. Maka aksi yang dikoordinasi Bersih, yakni koalisi dari 84 lembaga nonpemerintah yang berdiri sejak November 2007, diperkirakan tidak akan menggelinding menjadi gelombang aksi besar.

Etnis Melayu Merasa Lemah

Menurut pengamat politik Malaysia, Wong Chin Huat, partisipasi etnis Melayu dalam aksi

anti-Najib begitu sedikit, karena secara politik mereka merasa lemah melihat tiga parpol utama Melayu --KPR, PAS dan UMNO-- terpecah. Sedangkan etnis China tampak begitu kompak di belakang parpol oposisi, terutama DAP (Democratic Action Party).

Jadi, jika kubu Najib ingin mencegah etnis Melayu turun ke jalan bersama massa demonstran lain, caranya mudah. Warga Melayu

tinggal "ditakut-takuti," bahwa jika Najib sampai terguling, yang rugi bukan hanya Najib, tetapi UMNO --partai yang didominasi Melayu dan sekarang berkuasa--juga akan sangat melemah. Akibatnya, etnis China-lah nanti yang akan memimpin pergerakan ekonomi baru.

UMNO begitu bersikeras menentang aksi Bersih 4.0, karena sistem politik di Malaysia tidak memberi pilihan yang nyaman bagi suatu rezim yang jatuh. Menurut Wong Chin Huat, di Malaysia mereka menggunakan sistem winner takes all, di mana pihak yang kalah bukan hanya tersisih, tetapi juga "dianiaya."

Bisa dipahami, jika etnis Melayu enggan turun ke jalan. Namun, adalah berbahaya bagi persatuan Malaysia dan tidak elok jika sikap politik warga dikotak-kotakkan berdasarkan ras, etnis, atau agama. Setiap rakyat Malaysia menginginkan negaranya menjadi lebih bersih, bebas, dan demokratis, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan etnis atau agama.

Maria Chin Abdullah sendiri membantah keras, bahwa gerakan Bersih 4.0 berkaitan dengan keinginan etnis China untuk menghapus keistimewaan yang dinikmati etnis Melayu. "Perhimpunan kami adalah rakyat Malaysia. Kami telah bersatu padu sebagai rakyat Malaysia. Itu (tuduhan kepentingan etnis China) adalah isu rasis. Tetapi, kami tidak akan terpecah oleh isu rasis, agama, maupun budaya," tegasnya.

Sayangnya, justru Najib sendiri yang memainkan isu agama dan etnis untuk menyelamatkan kursi kekuasaannya. Najib terus menyerang pengunjuk rasa lewat media sosial. Lewat akun Twitter-nya, Najib menegaskan, pemuka agama telah mengharamkan aksi unjuk rasa serupa. "Waima, Mufti Kelantan sendiri telah menyatakan bahwa demonstrasi jalanan dan perhimpunan Bersih 4.0 tesebut adalah hukumnya haram di sisi agama Islam," tulis Najib. ■ Satrio Arismunandar

Menunggu Hasil Gebrakan Kemenpora

Indonesia akan menghadapi tiga multi *event* olahraga internasional, yakni Olimpiade 2016, SEA Games 2017, dan Asian Games 2018. Dari tiga multi *event* itu, kontingen Merah-Putih, ditargetkan bisa mencapai prestasi yang baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Untuk bisa merealisasikan target-target tersebut, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan menjabat sebagai Ketua Satlak Prima. Karena lembaga tersebut memiliki peran penting untuk menggembleng atlet-atlet yang akan mewakili Indonesia di kejuaraan olahraga internasional, baik di dalam maupun di luar negeri.

Oleh sebab itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar uji kelayakan (*fit and proper test*) bagi tujuh calon Ketua Satlak Prima yang baru untuk menggantikan Suwarno yang masa jabatannya akan segera habis.

Ketujuh calon tersebut yaitu Suwarno yang kini masih menjabat sebagai Kasatlak Prima, Ketua Umum PB PODSI Achmad Sutjipto, anggota Dewan Pakar PB PRSI Lukman Niode, mantan perenang nasional Richard Sam Bera, Sekjen PP PBSI Anton Subowo, akademisi UNJ Mulyana, dan Wasekjen PB PJSI Sadiq Algadri.

Dalam waktu sekitar 50 menit, setiap calon diberi kesempatan untuk memaparkan visi misinya, sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 10 anggota Dewan Pelaksana Prima.

Suwarno, yang menjabat Ketua Satlak Prima sejak 2014, ingin memperbanyak “training camp” dan “try out” bagi para atlet dan pelatih untuk mengukur kualitas mereka.

“Prestasi harus menjadi suatu kebutuhan bagi seorang atlet,” ujar purnawirawan Mayjend TNI itu.

Berbeda dengan Suwarno, Achmad Sutjipto justru menekankan pada penerapan “sport science” untuk menyukseskan program revitalisasi

pembinaan olahraga Indonesia. Ia juga berharap setiap PP/PB memiliki “high performance director” yang akan mengarahkan upaya setiap PP/PB untuk meningkatkan kualitas cabang olahraga yang mereka tekuni.

“Kalau sistem pembinaan sudah bagus, ‘performance’ akan mengikuti di belakang. Target adalah bagaimana sistem pembinaan prestasi di Indonesia bisa sejajar dengan negara lain, artinya bisa diukur efektivitas, output, dan prosesnya,” kata Achmad yang merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Indonesia periode 1999 - 2001.

Dewan Pakar PB PRSI Lukman Niode menjadi calon ke tiga dengan pemaparan visi dan misi seputar bagaimana menyederhanakan sistem kerja Satlak Prima sesuai dengan keinginan pemerintah untuk merampingkan komposisi anggota organisasi tersebut dari 150 orang menjadi 50 orang.

“Manajemen sistemnya yang harus diubah, yang paling penting bagaimana kerja sama Prima ke bawahnya yaitu dengan PP/PB dan ke atasnya yaitu dengan Kemenpora, KONI, dan KOI,” ujar mantan perenang nasional itu.

Mantan atlet renang lain yakni Richard Sam Bera justru menekankan pada pembenahan diri setiap PP/PB dengan tidak bergantung pada sumber dana dari pemerintah, KONI, maupun KOI, melainkan lebih memberdayakan pihak swasta untuk berkontribusi pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.

“Dari pendekatan saya ke pihak swasta, mereka sebenarnya berminat, tapi di sisi lain mereka juga khawatir kalau bantuannya tidak sampai ke sasaran,” ujar perenang putra yang eksis pada tahun 1980 hingga 2000-an itu.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata dia, juga banyak yang berminat membantu asal langkah kerja samanya jelas, lewat satu pintu, tepat sasaran, dan bisa



dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sementara itu, Sekjen PP PBSI Anton Subowo ingin fokus pada cabang-cabang olahraga prioritas dibandingkan cabang unggulan, wajib, dan tambahan.

“Satlak Prima sangat memerlukan peran KONI dalam menentukan kebijakan monitoring dan evaluasi pembinaan serta pengembangan cabang olahraga berpotensi,” ujarnya.

Selain itu, anak kandung Ketua KOI Rita Subowo itu juga menekankan pentingnya peran KOI untuk berhubungan dengan federasi atau komunitas olahraga internasional untuk memperoleh referensi dan bantuan pembinaan serta pengembangan cabang olahraga di Indonesia.

Berlatar belakang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Mulyana menawarkan program yang melibatkan universitas-universitas yang memiliki keunggulan di bidang “sport science”.



“Untuk pembinaan atlet, ajak perguruan tinggi yang memiliki keunggulan cabang olahraga misalnya pencak silat di UNJ, sepak bola di UNY, atletik di UNNES, dayung di UPI dan Universitas Cenderawasih, dan wushu di UNIMED,” tuturnya.

Berbeda dengan keenam pesaingnya, strategi yang dipaparkan Sadiq Algadri lebih terperinci dengan strategi jangka pendek meloloskan 12 cabang olahraga unggulan menuju Olimpiade 2016.

Strategi jangka menengah yaitu meraih target juara umum SEA Games 2017 dengan mengintegrasikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia untuk bisa dipertandingkan dalam *event* tersebut.

Sementara strategi jangka panjang, ia memprioritaskan 15 cabang olahraga unggulan yang berpotensi meraih 16 medali emas.

“Tapi aturan yang berbeda di setiap kompetisi membuat perolehan

medali Indonesia menjadi sangat fluktuatif. Pengawasan terhadap cabang unggulan juga menjadi kendala,” tutur Wasekjen PB PJSI itu.

Kriteria Deputy V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S. Dewa Broto yang menjadi salah satu anggota Dewan Pelaksana Prima menyebutkan tiga kriteria penilaian yang diberikan kepada tujuh calon Ketua Satlak Prima.

“Pertama, adanya target yang realistis. Sebagai calon mereka bisa saja menyebutkan target misalnya ingin masuk lima besar atau 10 besar dalam ajang tertentu, tapi yang terpenting bagaimana tahapan konkret mencapai target tersebut,” ujarnya di sela-sela acara uji kelayakan calon Ketua Satlak Prima di Wisma Kemenpora.

Ke dua, kata dia, yaitu keberanian setiap calon untuk mengambil satu studi kasus, memaparkan penyebab, dan kemudian mengusulkan solusi atas kasus tersebut.

Ke tiga, bisa membedah setiap kendala atau persoalan secara jujur dan terbuka.

Sayangnya, kata dia, sebagian besar calon tersebut belum ada yang berani mengambil studi kasus. Visi misi yang dipaparkan oleh setiap calon pun masih bersifat umum.

“Padahal saya ingin mereka terbuka dan jujur. Misalnya, bilang saja kalau Kemenpora lamban dalam mengurus lelang untuk pengadaan alat,” Gatot menambahkan.

Selain itu, Gatot juga menekankan bahwa tujuh calon yang salah satunya akan terpilih sebagai Ketua Satlak Prima tidak boleh merangkap jabatan.

“Saat seseorang terpilih menjadi Ketua Satlak Prima dia harus menandatangani suatu pakta integritas bahwa dia akan melepaskan jabatan-jabatan lain agar bisa fokus ke Satlak,” tuturnya.

Setelah Ketua Satlak Prima diikat dengan pakta integritas, diharapkan anggota-anggotanya juga akan melepaskan diri dari jabatan lain di luar Satlak Prima.

Jika dalam kepemimpinannya ternyata atlet Indonesia gagal mencapai target dalam suatu *event*, kata Gatot, maka Ketua Satlak Prima terpilih akan berhadapan dengan konsekuensi pencopotan jabatan.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, tiga calon yang menempati peringkat teratas akan diusulkan oleh Ketua Dewan Pelaksana Prima dalam hal ini Ketua KONI Pusat Tono Suratman kepada Ketua Dewan Pengarah Prima yaitu Menpora Imam Nahrawi.

“Nanti Menpora yang akan memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi Kasatlak Prima,” ujar anggota Dewan Pelaksana Prima K. Inugroho.

Kali ini pemerintah membuat terobosan baru yang cukup penting, proses seleksi dan uji kelayakan calon Ketua Satlak Prima bersifat terbuka untuk umum.

Tinggal kita tunggu mampukah “Komandan” terpilih nanti membawa berprestasi di ajang internasional kelak. ◻ Zaelal Arifin



Satu Vaksin Untuk Banyak Penyakit Flu

Dua kelompok ilmuwan yang terpisah dalam makalahnya pekan lalu, memaparkan jenis vaksin flu terbaru yang bisa memberikan perlindungan terhadap beberapa serangan penyakit yang beragam, tidak hanya satu. Meskipun, vaksin flu tersebut bersifat universal, namun dapat diberikan

kepada manusia beberapa tahun kemudian. Bahkan, ahli penyakit menular di bidang kedokteran memuji temuan baru tersebut sebagai sebuah terobosan besar di bidang medis.

“Ini bisa jadi sebuah temua yang sangat menjanjikan. Tidak ada masalah dengan mereka,” kata Dr

Peter Palese, seorang ahli flu terkenal dari Mount Sinai Hospital di kota New York, Amerika Serikat.

“Apa yang perlu kita lakukan sekarang yaitu, menguji (vaksin) pada manusia dan melihat apakah vaksin tersebut mulai bekerja. Itulah satu-satunya pertanyaan pada saat ini.”

Satu kelompok peneliti, yang temuannya dipublikasikan dalam jurnal *Nature Medicine*, menguji jenis baru vaksin ini pada hewan tikus dan musang. Sedangkan, kelompok lainnya, yang menerbitkan makalah tersebut, mengujinya pada monyet.

Kedua tim menemukan, bahwa vaksin itu berfungsi dan menimbulkan kekebalan terhadap subjek penelitian terhadap kedua jenis flu 'H1N1', yang sering disebut "flu babi", dan jenis 'H5N1' atau "flu burung".

Padahal sekarang, semua vaksin flu hanya mampu melindungi terhadap satu serangan tertentu dari flu.

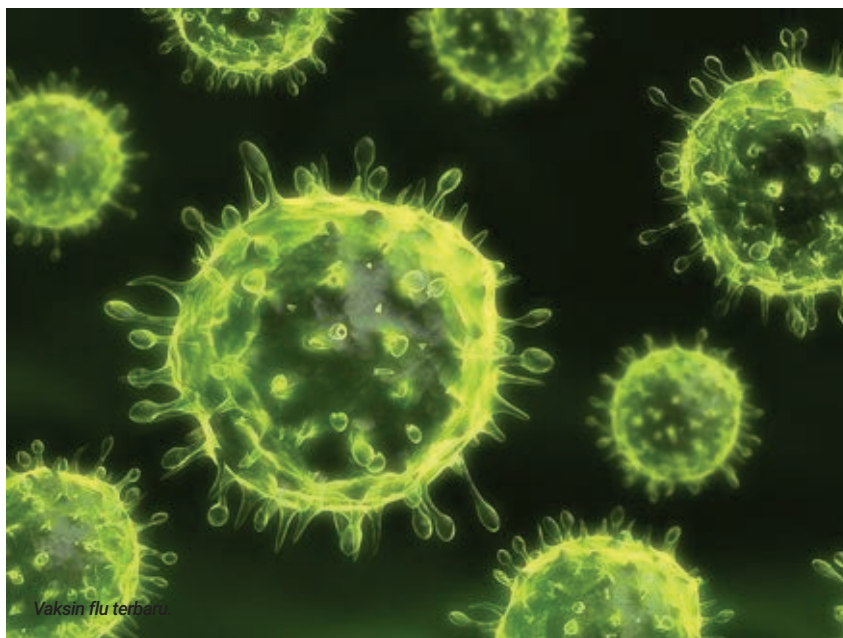
Bila jenis vaksin baru itu dapat bekerja pada manusia, maka butuh waktu uji klinis sebelum vaksin tersebut bisa dijual ke pasar secara bebas. Para ahli percaya bahwa dalam dekade ini, kita bisa memiliki vaksin yang melindungi terhadap serangan berbagai jenis influenza selama bertahun-tahun.

Sebelumnya, Virologis asal Amerika Serikat, Jonas Salk (1914-1995) dan Thomas Francis (1900-1969) mengembangkan sebuah vaksin flu pertama kalinya pada tahun 1938 silam. Setiap vaksin yang dikembangkan sejak saat itu telah diujikan pada prinsip dasar yang sama, dimana vaksin menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia untuk memproduksi antibodi yang menempel pada 'hemagglutinin' virus flu tersebut. Kemudian bagian yang terkena virus yang bisa mengakses sel-sel manusia. Antibodi mencegah virus serta serangan sel-sel yang menyebabkan penyakit.

Untuk diketahui, suntikan vaksin untuk penyakit flu pada umumnya mengandung tiga atau empat jenis vaksin yang mampu, sehingga mereka dapat menawarkan kekebalan terhadap beberapa serangan.

Namun, virus flu juga ternyata mampu mengubah susunan genetiknya dengan sangat cepat. Ujung 'hemagglutinin'-nya bisa berubah dari tahun ke tahun. Akibatnya vaksin yang diberikan tahun ini belum tentu mampu memberikan kekebalan tubuh di tahun berikutnya.

Tapi para ilmuwan yang menulis dua makalah tersebut mengambil suatu pendekatan yang berbeda. Alih-alih menargetkan ujung



'invasif hemagglutinin', ilmuwan menargetkan "batang", yang menghubungkan ujung ke seluruh virus. Karena struktur tersebut, antibodi yang menyerang 'batang' bisa meredakan berbagai serangan.

Para ilmuwan tidak pernah berpikir bisa mengembangkan vaksin yang ditujukan terhadap 'batang hemagglutinin' ini. Itu menjadi jelas setelah beberapa tahun yang lalu ditemukan bukti ternyata manusia menghasilkan antibodi yang menargetkan 'batang'.

Permasalahannya tidak semua manusia mampu menghasilkan sangat banyak antibodi tersebut. Dan, itu masih belum jelas apakah sebuah vaksin bisa memacu sistem kekebalan tubuh manusia untuk memproduksi antibodi 'batang' yang menargetkan melawan berbagai serangan flu itu.

Bahkan, jika vaksin mampu memicu produksi jumlah 'batang' yang cukup banyak untuk menghasilkan antibodi, namun tidak ada yang tahu berapa lama tubuh akan menyerapnya dan bekerja setelah vaksinasi. Jadi kita tidak tahu berapa lama setiap kekebalan yang diberikan oleh suntikan flu tersebut akan bertahan.

"Dalam dunia yang modern, itu

akan berlangsung seumur hidup," kata Dr Ian Wilson dari Scripps Research Institute di La Jolla, California, AS yang merupakan salah satu penulis jurnal ilmiah.

"Tapi kita tidak tahu berapa lama akan bertahan untuk saat ini. Tujuannya agar Anda tidak perlu mendapatkan imunisasi setiap tahun. Tapi mungkin sekali setiap lima tahun atau sepuluh tahun. Itu akan menjadi langkah maju yang besar."

Namun, salah satu kekhawatiran yang muncul adalah virus flu bisa merubah variasi strukturnya, dimana 'batang'-nya lebih banyak dari yang ada saat ini. Ini salah satu kelemahan dari jenis vaksin terbaru yang diciptakan ilmuwan baru-baru ini.

"Ini merupakan 'perang' konstan dengan semua virus tersebut," kata Wilson.

"Pada dasarnya, sistem kekebalan tubuh dapat menetralkan virus yang menginfeksi, kemudian mencegah virus itu menyebar, dan sistem kekebalan tubuh akhirnya menyerang virus baru itu....ini adalah proses konstan yang terjadi dengan semua virus."

Hanya penelitian lebih lanjut - termasuk percobaan manusia - akan dapat menjawab seluruh pertanyaan di atas. © Ferro Maulana

Mengisi Kekosongan Sejarah Melalui Novel

Oleh: **Virdika Rizky Utama**

Pegiat Pers Mahasiswa di Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika, Universitas Negeri Jakarta

Sejarah hanya untuk orang-orang yang menang. Narasi sejarah di negeri ini pun lebih cenderung ke arah itu.

Novel ini hanya salah satu dari sekian narasi sejarah yang berusaha bercerita soal sejarah orang yang kalah: sisi lain dari sejarah pasca kudeta 1965. Sebuah cerita mahasiswa Indonesia di luar negeri yang dikirim oleh Soekarno untuk mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara yang sudah lama merdeka. Mereka dikirim untuk mewujudkan konsep Trisakti, berdaulat di bidang politik dan ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Tokoh utama dalam novel ini adalah Dewa Soeradjana yang biasa dipanggil Djani. Ia mahasiswa yang dikirim ke Slovenia pada Maret 1961 (hal.22) dengan jurusan studi kimia. Awalnya, ia bangga bisa kuliah di luar negeri dan terlibat dalam perumusan konferensi gerakan Nonblok 1961. Tak hanya itu, ia juga menasbihkan diri sebagai seorang Soekarno. Tak jarang dalam beberapa percakapan dengan tokoh lain, ia sangat mengangungkan Soekarno dan ajarannya (hal.70-71).

Ketika kudeta 1965 terjadi, ia merasa kehidupannya mulai terancam. Bukan hanya Djani, melainkan seluruh mahasiswa yang dikirim Soekarno ke negara-negara kiri sedang terombang-ambing. Gerak-gerik mereka diawasi oleh mata-mata pemerintah Orba melalui atase militer di negara masing-masing (Hal.70).

Ia tak berani pulang ke Indonesia sebab banyak teman dan sanak saudaranya dibunuh karena pro

Soekarno (hal.90). Hingga suatu ketika, ia mendapat undangan misterius. Dia ragu untuk datang. Namun, rasa penasaran dan kerinduannya akan kabar terbaru dari tanah air mengalahkan ketakutan dan

dianggap diktator dan hanya menjual Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia ke luar negeri. Soemitro bahkan merencanakan untuk membawa kabur Soeharto ke Eropa sebagai bagian rencana kudeta (hal.185). Akan tetapi, rencana itu gagal sebab Ali Murtopo ternyata membelot dan mendukung Soeharto.

Peristiwa kup gagal itu dikenal dengan peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974. Setelah mengetahui itu, semua anggota konferensi Wina menjadi buruan utama Orba. Termasuk Djani dan nyawa seluruh anggota keluarganya di Indonesia. Ia berani kembali Indonesia pada 1978, setelah 17 tahun meninggalkan Indonesia. Itupun dengan pemeriksaan yang sangat ketat.

Buku yang berdasarkan kisah hidup Djani ini, sangat menarik untuk dibaca. Ia menceritakan bagaimana kehidupan mahasiswa Indonesia di negara-negara Eropa Timur yang tak seberuntung Djani. Sehingga kewarganegaraan mereka dicabut oleh pemerintah dan hidup menjadi eksil.

Tak hanya itu, penulis lebih memilih menceritakan sebuah kesaksian sejarah tidak dengan buku teks sejarah yang mesti melewati tahapan heuristik, verifikasi, dan interpretasi yang sangat kaku. Penulis lebih memilih menceritakannya melalui sebuah novel. Sebab, novel lahir dari ketidaksempurnaan sejarah. Ia melengkapi yang luput atau tak tercatat oleh sejarah.

Sejarah sebuah bangsa semestinya didasarkan pada kebenaran yang ada dalam beberapa peristiwa. Akan tetapi, ada sejarah sebagian bangsa yang didasarkan pada beberapa kebenaran saja dari peristiwa yang sama. Tak hanya itu, sejarah mestinya dikisahkan harus dengan kejujuran sehingga dapat menjadi penerang bagi generasi mendatang, bukan mewariskan awan gelap masa lalu.◦



Judul Buku: **The Missing History**
 Penulis: **Peer Holm Jørgensen**
 Penerjemah: **Gusti Nyoman Ayu Sukerti**
 Penerbit: **Noura Books**
 Tahun Terbit: **Cetakan I, Juni 2015**
 Tebal : **iv + 476 halaman**

kecurigaannya. Undangan tersebut berupa sebuah konferensi.

Konferensi selama hari di Wina pada 1972 itu ternyata bersifat rahasia. Dipimpin langsung oleh Jenderal Soemitro dan sejumlah petinggi Orba (hal.114), konferensi itu merencanakan sebuah kudeta terhadap Soeharto yang



BANK INDONESIA

BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



KURS . STATISTIK . INDIKATOR EKONOMI . RISET . HASIL SURVEY
PUBLIKASI . PERATURAN . KEBIJAKAN . KAJIAN . INVESTOR REGISTRY
PERPUSTAKAAN . MUSEUM

Gerai Info BI :

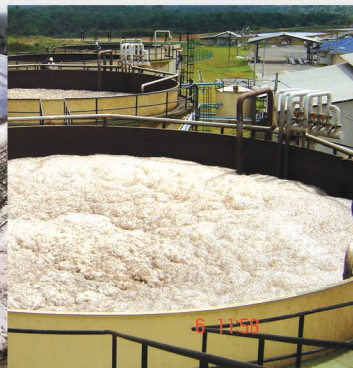
Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta 10350 Indonesia

www.bi.go.id

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



www.ebtke.esdm.go.id



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

DIREKTORAT BIOENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng Jakarta Pusat 10320

☎ 021-39830077 📠 021-31901087 ✉ info@ebtke.esdm.go.id